

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020

BADAN PERENCANAAN PEBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 73
Marabahan 70513



bappelitbangbatola@gmail.com



(0511) 4799222

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan telah selesai disusun dengan baik.

LKIP 2020 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Disamping itu seiring dengan meningkatnya tuntutan akan kualitas pelayanan maka lah berbagai penyempurnaan baik terhadap SDM maupun sistem ketatalaksanaan yang berlaku, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Akhir kata, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Bappelitbang guna semakin memperkuat kualitas perencanaan pembangunan untuk mewujudkan **Batola Setara**.

Marabahan, Februari 2021



Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc
NIP. 19660705 199203 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sarana strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Bappelitbang Tahun 2017-2022 (reviu ketiga). Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

Ringkasan kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yang dihasilkan pada tahun 2020 dengan sasaran **"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"** dengan indikator **"Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dari Unsur Perencanaan Kinerja"** adalah 99,86% (Sangat Baik)

Evaluasi terhadap pencapaian dan permasalahan yang ditemui pada setiap indikator sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala ke depan, yaitu :

1. Kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat (penerapan perencanaan yang akan terintegrasi dengan penganggaran).
2. Instrumen pengendalian (monitoring dan evaluasi) pembangunan yang belum memanfaatkan suatu aplikasi yang terpadu.

Hasil evaluasi dan reviu yang disampaikan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bernilai penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dalam perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.2.1. Tugas Pokok	2
1.2.2. Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Isu-Isu Strategis	5
1.5. Landasan Hukum	6
1.6. Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Perencanaan Strategis	8
2.1.1. Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	8
2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator	8
2.2. Rencana Kerja Tahunan	12
2.3. Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	18
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	19
3.2.1. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan untuk Mencapai Target IKU	23

3.2.2.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Pencapaian IKU	23
3.2.3.	Program/Kegiatan yang Menunjang untuk pencapaian Kinerja Sasaran	24
3.2.4.	Analisis Kinerja Kegiatan	33
3.2.5.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Serta Indikator Kinerja Kegiatan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022	56
3.3.	Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV	PENUTUP	61
	Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Bappelitbang Kab. Batola 2017-2022	9
Tabel 2.2. Matriks Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kab. Batola (setelah direviu)	10
Tabel 2.3. Pembobotan Nilai SAKIP	11
Tabel 2.4. Target Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Sebagai Indikator Tujuan Bappelitbang	11
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II dan Perencanaan Anggaran Bappelitbang Kab. Batola Tahun 2020	14
Tabel 2.6. Program Pendukung Bappelitbang Kab. Batola Tahun 2020	14
Tabel 2.7. Rata-Rata komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP seluruh SKPD	15
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bappelitbang Kab. Batola Tahun 2020	19
Tabel 3.3. Perbandingan IKU Tahun 2019 dengan Tahun 2020	20
Tabel 3.4. Realisasi Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito kuala sebagai Indikator Tujuan Bappelitbang	22
Tabel 3.5. Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Sasaran/IKU Bappelitbang Tahun 2020	22
Tabel 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbang Tahun 2020	22
Tabel 3.7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappelitbang Tahun Anggaran 2020	24
Tabel 3.8. Target Nilai Rata-rata Komponen Perencanaan Kinerja SKPD	25
Tabel 3.9. Rekapitulasi LHE SKPD Kab. Batola SAKIP 2019	25
Tabel 3.10. Target Capaian Nilai SAKIP SKPD Bidang Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi & Fisik Prasarana	28
Tabel 3.11. Capaian Nilai SAKIP SKPD Bidang Sosial dan Budaya	28

Tabel 3.12.	Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Program Bidang Sosial dan Budaya	29
Tabel 3.13.	Capaian Nilai SAKIP SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana	30
Tabel 3.14.	Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Program Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana	31
Tabel 3.15.	Realisasi Indikator Program Bidang Pengendalian dan Penelitian & Pengembangan	33
Tabel 3.16.	Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2019	39
Tabel 3.17.	Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub Bidang Pemerintahan	40
Tabel 3.18.	Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja Sub Bidang Sosial dan Budaya Tahun 2019	42
Tabel 3.19.	Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub Bidang Sosial dan Budaya	43
Tabel 3.20.	Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja Sub Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2019	44
Tabel 3.21.	Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	45
Tabel 3.22.	Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja Sub Bidang Ekonomi Tahun 2019	47
Tabel 3.23.	Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub Bidang Ekonomi	48
Tabel 3.24.	Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja Sub Bidang Fisik Prasarana Tahun 2019	49
Tabel 3.25.	Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub Bidang Fisik Prasarana	50
Tabel 3.26.	Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja SKPD Sosial Budaya	51
Tabel 3.27.	Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja SKPD Ekonomi dan Fisik Prasarana	54
Tabel 3.28.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Serta Indikator Kinerja Kegiatan Bappelitbang Tahun 2017-2022	56
Tabel 3.29.	Komposisi Belanja Bappelitbang Kab. Batola Tahun Anggaran 2020	58
Tabel 3.30.	Pagu dan Realisasi Anggaran yang terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Bappelitbang Tahun 2020	59

Tabel 3.31.	Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Bappelitbang Kab. Batola Tahun 2020	60
Tabel 3.32	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Bappelitbang Kab. Batola Tahun 2020	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1.	Bagan Struktur Organisasi Bappelitbang Tahun 2020	Hal 4
Gambar	1.2.	Bagan Struktur Organisasi Bappelitbang Tahun 2021	5
Gambar	3.1.	Buku RKPD Tahun 2020 Perubahan dan RKPD Tahun 2021	37
Gambar	3.2.	Dokumen Hasil Penelitian	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	RFK Form I
Lampiran	2	Keselarsan Kinerja Output-Penganggaran Tahun 2020
Lampiran	3	Hasil Evaluasi SAKIP Kab. Batola Tahun Sebelumnya
Lampiran	4	Hasil Evaluasi SAKIP Kab. Batola Tahun 2020
Lampiran	5	Dokumentasi Renja dan Renstra SKPD
Lampiran	6	Formulir penilaian

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Kinerja berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dan juga memperhatikan tujuan dan sasaran pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan

dengan pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan peraturan bupati barito kuala nomor 47 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah daerah di Urusan Perencanaan sesuai dengan kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memiliki:

1.2.1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.

1.2.2. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana serta penelitian dan pengembangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

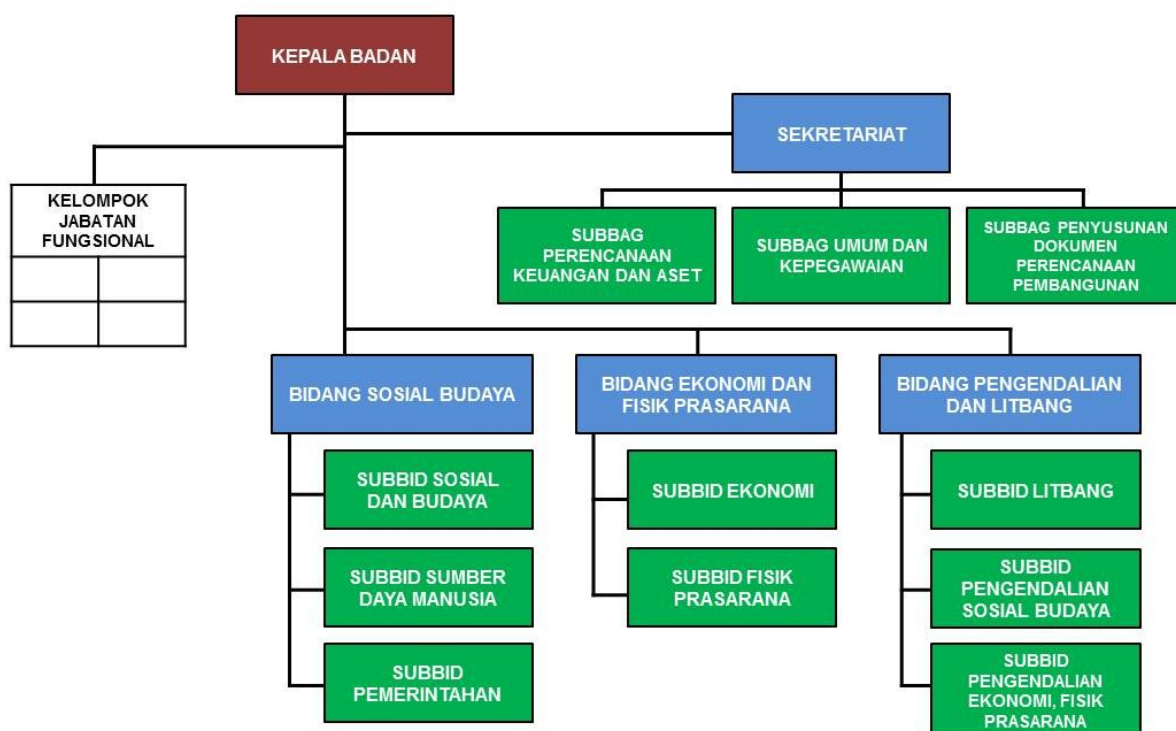
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana serta penelitian dan pengembangan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana serta penelitian dan pengembangan.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 terdiri dari:

- a) Kepala Badan
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
- c) Bidang Sosial Budaya, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya
 - 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan
- d) Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Ekonomi
 - 2. Sub Bidang Fisik Prasarana
- e) Bidang Pengendalian dan Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari;
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Sosial dan Budaya
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Ekonomi dan Fisik Prasarana
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Bappelitbang Tahun 2020

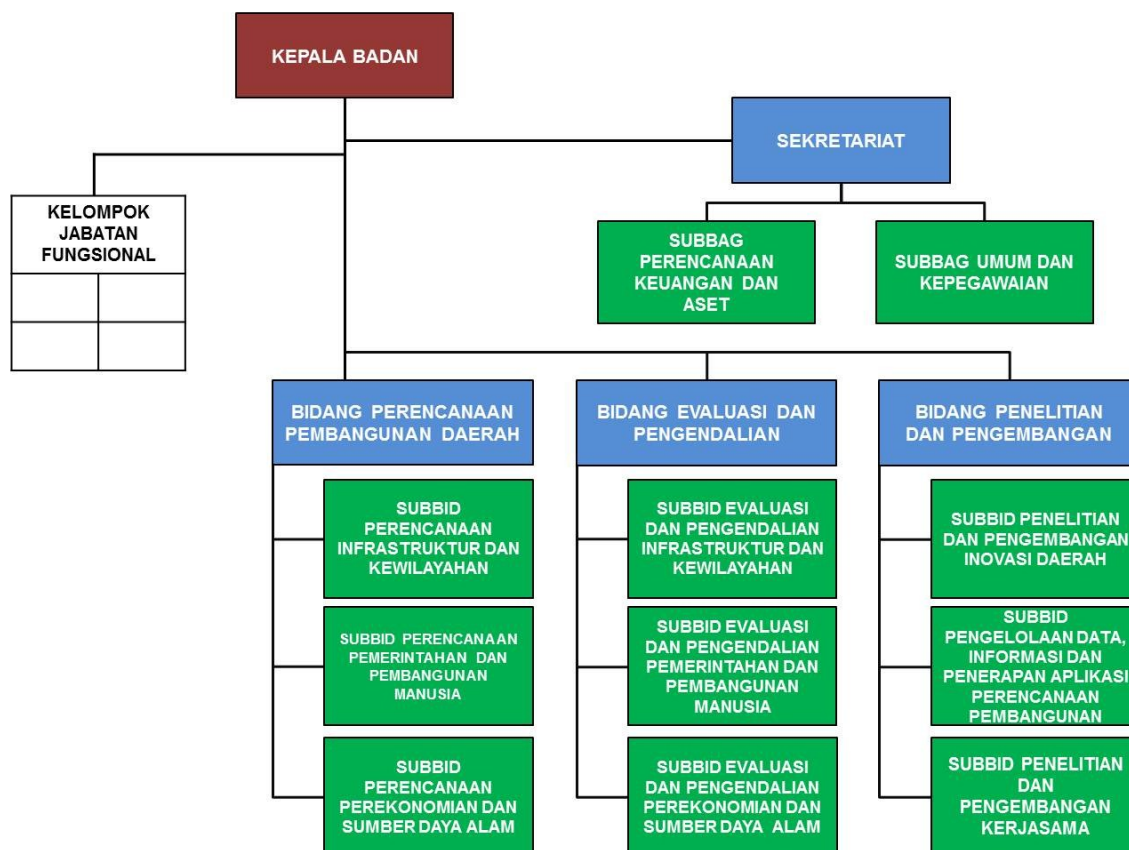


Pada Tahun 2021 susunan organisasi Bappelitbang berubah sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomo 101 Tahun 2020 yang terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
 2. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 3. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- d. Bidang Evaluasi dan Pengendalian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Infratraktur dan Kewilayahan
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah
 2. Sub Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Penerapan Aplikasi Perencanaan Pembangunan
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kerjasama
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Bappelitbang Tahun 2021



1.4 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berkembang dan harus ditindaklanjuti dan menjadi bagian Tupoksi Bappelitbang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengendalian Tata Ruang yang sebagaimana amanat Perda Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012, sejak awal tahun 2020 urusan penataan ruang sudah dipindah ke dinas PUPR karena sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sehingga penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan/Kecamatan (RDTRK) lebih komprehensif.
2. Kualitas Dokumen Perencanaan di semua SKPD yang perlu ditingkatkan dan perlu didukung oleh kajian.
3. Belum optimalnya koordinasi dan komitmen institusi perencanaan, penganggaran dan pelaksana mewujudkan perencanaan berkualitas.
4. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah karena aplikasi perencanaan belum siap diterapkan di daerah.
5. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran dalam satu system aplikasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.5 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbang Tahun 2020 dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (SAKIP) di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

1.6 Sistematika

Penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan Perencanaan Strategis sebelum dan setelah revidi, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan akuntabilitas kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”**, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

- a. Mengintegrasikan infrastruktur wilayah yang mendukung kemadirian desa dan perkotaan.
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui inovasi teknologi berbasis pertanian
- c. Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan, kesehatan dan profesionalitas sumber daya manusia
- d. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dicantumkan juga Visi dan Misi Bappelitbang selaku SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan. Sesuai Renstra Bappelitbang 2017-2022 Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

- a. Visi Bappelitbang adalah “Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”.
- b. Misi Bappelitbang adalah “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel 2.1.

Tujuan Bappelitbang adalah Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani pada urusan perencanaan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Sedangkan sasaran Bappelitbang adalah *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*, dengan 1 (satu) indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan Kinerja.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (setelah direviu)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani pada urusan perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan.

Tabel 2.2
Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (setelah direviu)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani pada urusan perencanaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan.	$\text{Nilai SAKIP Kabupaten} \times 30\%$	Bobot Nilai SAKIP a. Perencanaan Kinerja 30% b. Pengukuran Kinerja 25% c. Pelaporan Kinerja 15% d. Evaluasi Internal 10% e. Capaian Kinerja 20%	Sekretariat, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Fisik Prasarana dan Bidang Dal Litbang	Dokumen RPJMD, RKPD, Laporan Kerja Evaluasi dari Inspektorat dan Dokumen Hasil Kajian dan Litbang

Table 2.3
Pembobotan Nilai SAKIP

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)
1.	Perencanaan kinerja	30
2.	Pengukuran kinerja	25
3.	Pelaporan kinerja	15
4.	Evaluasi Internal	10
5.	Capaian kinerja	20
	Jumlah	100

Tabel 2.4
Target Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari nilai SAKIP
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Sebagai Indikator Tujuan Bappelitbang

No	Tahun	Nilai SAKIP			KET
		Target Nilai SAKIP Kabupaten sesuai RPJMD 2017-2022*	Target Komponen Perencanaan Kinerja (30% dari total)	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	
1	2015	46,08	17,65	C	
2	2016	50,02	18,02	CC	
3	2017*	55,73	18,78	CC	
4	2018*	69,23	20,77	B	
5	2019*	73,55	22,07	BB	
6	2020*	76,55	22,96	BB	
7	2021*	77,05	23,12	BB	
8	2022*	78,28	23,48	BB	

Indikator Tujuan dari “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani pada urusan perencanaan” adalah “Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”. Dari Tabel 2.4. diatas dapat

diartikan bahwa Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala meningkat bila komponen perencanaan kinerja naik.

Untuk Tahun 2020 Target nilai SAKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja adalah minimal sebesar 22,96 agar nilai total SAKIP kabupaten mencapai 76,55 (sesuai target RPJMD) dengan status BB.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan ada 3 hal yang harus dipenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dijelaskan pada Bab III.

Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen Renstra yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja dan secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan, indikator kinerja dapat berupa output maupun outcomes.

Target merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai tahun 2020, sasaran, indikator kinerja dan target mengalami perbaikan sesuai kebutuhan. Sehingga renstra

Bappelitbang mengalami proses reuiu. Indikator Kinerja Utama awal Bappelitbang dan Setelah di reuiu adalah sebagai berikut:

- a) Tahun 2018 dengan 2 (dua) indikator adalah:
 - 1. Persentase Perencanaan Pembangunan yang Direalisasikan
 - 2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW
- b) Tahun 2019 dengan 2 (dua) indikator adalah:
 - 1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja
 - 2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW
- c) Tahun 2020-2022 adalah "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan"

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh SKPD akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan, SKPD akan lebih baik dimana akan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang telah direviu, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020.

Dari 1 (satu) indikator sasaran dengan yang diperjanjikan didukung oleh 6 (enam) program utama yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp 1.714.765.593,00 dan 4 Program pendukung dengan anggaran sebesar Rp.874.973.672,00** dengan rincian pada tabel 2.5 dan table 2.6 berikut.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II dan Perencanaan Anggaran
Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	6	7
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan	Nilai	22,07	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	346.452.160
				2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	604.797.614
				3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	237.714.990
				4. Program Kajian dan Penelitian	98.610.614
				5. Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	31,565.000
				6. Program Perencanaan Fisik dan Prasarana	395.625.215
Jumlah					1.714.765.593

Mengingat LHE Nilai Sakip SKPD dan Nilai Sakip Kabupaten diterbitkan setelah tahun anggaran 2020 oleh Inspektorat Kabupaten dan Kemenpan / Inspektorat Provinsi, maka penetapan Target Pencapaian Indikator diambil berdasarkan LHE pada Tahun 2019. Maka Indikator yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan Kinerja" ditargetkan mencapai nilai 22,07 (sesuai dengan target RPJMD).

Tabel 2.6
Program Pendukung Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	533.010.735
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	271.761.972
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70.200.965
Total		874.973.672

Sehubungan dengan adanya Pandemi COVID-19, anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ditiadakan karena adanya larangan untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah.

Pada akhir tahun 2020, Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana dan Bidang Sosial dan Budaya telah membuat proyeksi nilai rata – rata komponen Perencanaan Kinerja dari nilai SAKIP SKPD berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Tabel 2.7.

Nilai Rata-Rata Komponen Perencanaan Kinerja Dari Nilai SAKIP Seluruh SKPD

NO.	SKPD	NILAI SAKIP TAHUN 2019								
		RENSTRA				RENJA				TPK
		PR	KR	IR	T1	PPKT	KPKT	IPKT	T2	
1	Dinas Pendidikan	2,00	4,38	1,75	8,13	3,75	8,25	3,30	15,30	23,43
2	Dinas Kesehatan	2,00	2,81	1,25	6,06	4,00	6,25	2,40	12,65	18,71
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1,72	4,22	1,75	7,69	3,75	8,25	3,30	15,30	22,99
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,00	4,84	2,25	9,09	4,00	9,00	3,00	16,00	25,09
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,00	4,22	1,00	7,22	4,00	9,25	3,30	16,55	23,77
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	2,00	2,81	1,25	6,06	4,00	8,00	3,00	15,00	21,06
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2,00	4,69	2,25	8,94	4,00	10,00	5,10	19,10	28,04
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,00	4,38	1,75	8,13	4,00	5,50	1,20	10,70	18,83
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,72	3,75	2,25	7,72	4,00	8,00	3,60	15,60	23,32
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,78	3,91	1,75	7,44	3,00	7,00	2,40	12,40	19,84
11	Satuan Polisi Pamong Praja	2,00	4,22	1,25	7,47	5,00	7,25	2,40	14,65	22,12
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,00	3,75	2,00	7,75	3,75	8,00	2,70	14,45	22,20
13	Dinas Sosial	1,70	4,20	2,80	8,70	2,20	2,00	2,00	6,20	14,90
14	Sekretariat Daerah	2,00	4,30	2,40	8,70	3,80	9,80	5,00	18,60	27,30
15	Set. DPRD	2,00	4,38	2,25	8,63	3,75	8,50	3,60	15,85	24,48
16	Inspektorat	2,00	5,00	2,25	9,25	4,00	9,00	3,60	16,60	25,85
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.67	3,91	1,00	4,91	3,00	4,75	0,30	8,05	12,96
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,78	5,00	1,50	8,28	4,00	10,00	2,70	16,70	24,98

NO.	SKPD	NILAI SAKIP TAHUN 2019								
		RENSTRA				RENJA				TPK
		PR	KR	IR	T1	PPKT	KPKT	IPKT	T2	
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,78	5,00	1,50	8,28	4,00	10,00	2,70	16,70	24,98
19	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1,94	4,38	1,75	8,07	4,00	8,50	2,40	14,90	22,97
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,00	4,69	2,25	8,94	3,75	8,50	2,70	14,95	23,89
21	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,00	5,00	2,75	9,75	4,00	10,00	5,10	19,10	28,85
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1,94	4,53	1,75	8,22	4,00	10,00	4,20	18,20	26,42
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1,94	4,38	2,25	7,47	4,00	8,50	3,00	15,50	22,97
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,00	4,53	1,25	7,78	4,00	10,00	4,00	18,00	25,78
25	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2,13	4,38	1,75	8,26	4,00	3,15	1,20	8,35	16,61
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,83	3,75	2,00	7,58	3,75	8,00	3,90	15,65	23,23
27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2,00	5,00	2,25	9,25	4,00	9,00	3,60	16,60	25,85
28	Dinas Pehubungan	1,83	4,38	2,00	8,21	4,00	9,25	1,80	15,05	23,26
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,89	2,66	1,50	6,05	4,00	6,75	2,40	13,15	19,20
30	Dinas Lingkungan Hidup	2,00	5,00	3,00	10,00	4,00	5,00	2,40	11,40	21,40
31	Kec. Tabunganen	1,78	3,91	0,75	6,44	3,00	8,00	2,10	13,10	19,54
32	Kec. Mekarsari	1,61	4,06	1,75	7,42	2,50	5,50	1,20	9,20	16,62
33	Kec. Wanaraya	1,78	3,28	1,50	6,56	2,50	2,00	0,00	4,50	11,06
34	Kec. Anjir Pasar	1,78	3,75	1,00	6,53	3,00	7,75	2,40	13,15	19,68
35	Kec. Anjir Muara	1,72	3,75	2,00	7,47	3,75	8,00	3,00	14,75	22,22
36	Kec. Rantau Badauh	1,72	3,75	1,75	7,22	3,75	8,00	2,40	14,15	21,37
37	Kec. Bakumpai	1,72	3,75	2,00	7,47	3,75	8,00	3,00	14,75	22,22
38	Kec. Marabahan	1,72	3,75	2,25	7,72	3,75	8,00	3,60	15,35	23,07
39	Kec. Mandastana	1,72	4,06	1,75	7,53	3,75	8,75	3,00	15,50	23,03
40	Kec. Alalak	1,94	4,38	2,25	8,57	4,00	9,25	3,60	16,85	25,42
41	Kec. Barambai	2,00	3,75	0,75	6,50	4,00	8,00	2,10	14,10	20,60
42	Kec. Belawang	2,00	3,91	1,75	7,66	4,00	7,25	0,60	11,85	19,51
43	Kec. Tamban	1,72	3,75	2,00	7,47	3,75	8,00	3,30	15,05	22,52
44	Kec. Tabukan	1,72	3,28	1,50	6,50	3,50	7,25	2,40	13,15	19,65
45	Kec. Kuripan	1,72	4,38	1,75	7,85	4,00	5,75	1,200	10,95	18,80
46	Kec. Cerbon	1,50	4,38	2,25	8,13	3,75	10,00	4,80	18,55	26,68
47	Kec. Jejangkit	1,00	2,00	1,50	4,50	2,00	5,00	3,00	10,00	14,50

Berdasarkan table diatas maka dapat diperoleh nilai rata – rata untuk Renstra 7,69 dan Renja 14,16. Jika dibandingkan dengan nilai rata – rata tahun sebelumnya maka dapat dilihat adanya kenaikan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung- jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak/pemberi amanah yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala telah melakukan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disepakati dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 yang telah dilakukan perbaikan.

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, hasil pengumpulan data selanjutnya dibuat kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Bappelitbang menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan amanah pimpinan. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Tahun 2020 berdasarkan tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realiasi	Persentase	Kode
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan	%	22,07	22,04	99,86	Hijau Tua

Dari tabel di atas capaian Indikator Kinerja Utama Bappelitbang pada 2020 adalah 99,86%, Kemudian penentuan **Interval Kinerja** dan **Kriteria Kinerja** atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah termasuk di Level 1 ($91 \leq 100$) dengan kriteria **Sangat Baik** (Kode Warna Hijau Tua).

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISI KINERJA SASARAN STRATEGIS

Tahun 2020 adalah tahun ketiga dalam Perencanaan Jangka Menengah Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala. Pada tahun ini Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala melakukan Perubahan lagi Sasaran dan Indikator Kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal di jajaran ASN Bapelitbang Kab. Barito Kuala. Perubahan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk peningkatan kinerja dalam mendukung pencapaian kualitas dokumen perencanaan daerah.

Tabel 3.3
Perbandingan IKU Tahun 2019 dengan Tahun 2020

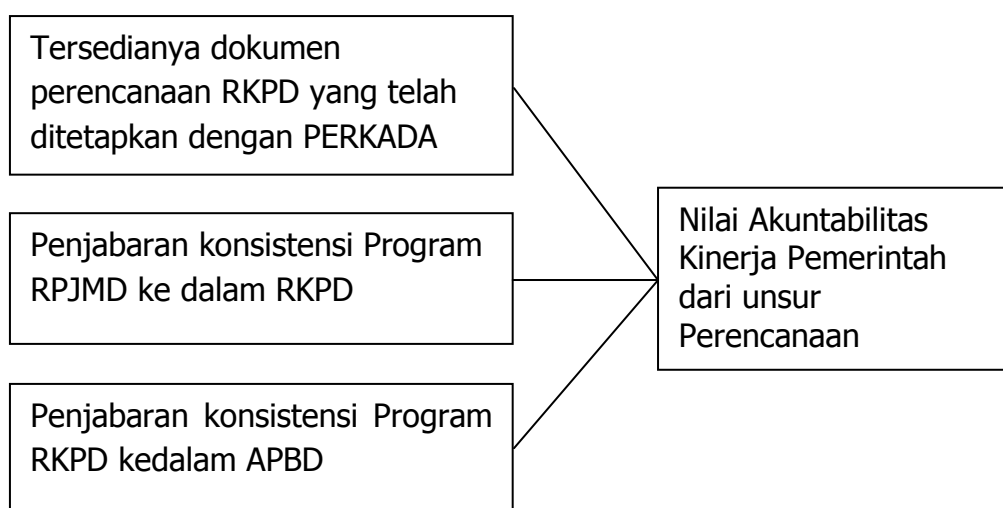
No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	2019	2020	2019	2020
1	Terwujudnya Perencanaan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan Kinerja.
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	

Sesuai ketentuan bahwa Pelaporan Kinerja disusun mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama serta Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang. Renstra awal Bappelitbang berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/253/KUM/2018 Tanggal 4 Juni 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala. Kemudian untuk Renstra Bappelitbang terakhir dilakukan revidi ke III (tiga) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappelitbang Nomor 81 Tanggal 11 Agustus 2020, dengan ketentuan bahwa dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator Kinerja menjadi 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja, seperti pada Tabel 3.3. diatas.

Sasaran Strategis **"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"** merupakan pengimplementasian pencapaian Misi Keempat RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani".

Untuk upaya pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah" Bappelitbang menetapkan 1 (satu) buah indikator kinerja, yaitu ; **"Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari unsur Perencanaan"**. Indikator ini dipilih sebagai gambaran capaian gabungan indikator berikut ini :

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA
3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
5. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
6. Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD
7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW



Skema di atas adalah gambaran perumusan indikator perencanaan sesuai Permenpan, dimana dari 7 indikator digabung menjadi 1 indikator. Untuk indikator 1 dan 2 sudah terlaksana pada tahun pertama masa kerja Kepala Daerah, sedangkan indikator 3 dan 7 menjadi bagian dari tupoksi DPUPR.

Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari unsur Perencanaan” diperoleh dari hasil LHE Inspektorat Provinsi tentang data nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari tahun-tahun sebelumnya. LHE dari Inspektorat Provinsi Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan dokumen LKIP 2020.

Adapun perhitungan/formulasi untuk menghitung indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indikator Sasaran Bappelitbang} = \text{Nilai SAKIP Kabupaten} \times 30\%$$

Table 3.4.

Realisasi Nilai Komponen Perencanaan Kinerja dari nilai SAKIP
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Sebagai Indikator Tujuan Bappelitbang

No	Tahun	Nilai SAKIP			Realisasi			KET
		Target Nilai SAKIP Kabupaten sesuai RPJMD 2017-2022*	Komponen Perencanaan Kinerja (30% dari total)	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Komponen Perencanaan	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	
1	2017*	55,73	18,78	CC	55,73	18,78	CC	Sesuai surat hasil evaluasi atas AKIP (lihat lampiran)
2	2018*	69,23	20,77	B	61,24	20,93	B	
3	2019*	73,55	22,07	BB	67,00	22,04	B	

Tabel 3.5.

Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Sasaran/IKU Bappelitbang Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	6	7
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan	22,07	22,04	99,86

Tabel 3.6.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbang Tahun 2020

Sasaran Strategis	Awal Renstra 2017	2018			2019			Target Akhir Renstra 2022	Capaian s/d 2020 terhadap 2022
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dari Unsur Perencanaan	18,78	20,77	20,93	100,77	22,07	22,04	99,86	23,48	93,87

Untuk capaian target 5 tahun Dokumen Renstra dari nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 sebesar 22,04 sudah tercapai 93,87 % ($=22,04/23,48 \times 100$).

Perlu diketahui, bahwa penetapan target indikator sebelum tahun 2019 berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan (tabel 3.3 diatas).

3.2.1. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan untuk Mencapai Target IKU

Dasar capaian Realisasi yang mendekati angka target pada indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari unsur perencanaan” adalah:

- a) Bahwa tersedianya perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda atau Perkada
- b) Bahwa hasil evaluasi terhadap konsistensi program RPJMD kedalam RKPD sudah baik
- c) Bahwa hasil evaluasi terhadap konsistensi program RKPD kedalam APBD sudah baik

3.2.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian IKU

Untuk mendukung pencapaian target “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari unsur perencanaan” dialokasikan dalam dana Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bappelitbang Tahun Anggaran 2020 Sebesar **Rp 2.589.739.265,00** dan telah terealisasi sebesar **Rp 2.406.216.198,00** sehingga terdapat efisiensi sebesar (183.523.067) 7,09%.

Tabel 3.7
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappedalitbang
Tahun Anggaran 2020

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari unsur perencanaan	99,86	95,25	7,09

3.2.3. Program/Kegiatan yang Menunjang untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis **"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah."** dengan indikator **"Nilai Akuntabilitas Pemerintah yang unsur perencanaan"** yang dituangkan dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan dengan indikator masing-masing sebagai berikut:

- a) Sasaran Program 1 yaitu **"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"** dengan mengambil sebuah Indikator Kinerja (IK) Program 1, yaitu **"Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja"**, Indikator ini diarahkan untuk menghitung jumlah nilai rata-rata hasil/capaian kinerja SKPD lingkup Kabupaten Barito Kuala dari unsur **Perencanaan Kinerja**. Data diambil dari Kertas Kerja Evaluasi AKIP atau Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Adapun perhitungan/formulasi dari indikator ini adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\Sigma \text{Jumlah Keseluruhan TPK semua SKPD.}}{\Sigma \text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

Ket : TPK = nilai "Total Perencanaan Kinerja"

Tabel 3.8
Target Nilai rata-rata Komponen Perencanaan Kinerja SKPD

No	Tahun	Nilai Rata-Rata Komponen Perencanaan Kinerja (Sesuai Data Renstra Review Ke 3)
1	2018	22,50
2	2019	23,30
3	2020	23,50
4	2021	23,75
5	2022	24,00

Tabel 3.9
Rekapitulasi LHE SKPD Kab. Barito Kuala SAKIP Tahun 2019

NO	SKPD	PEMERIKSAAN TAHUN 2019		
		TPK	NILAI SAKIP	
			NILAI	KATEGORI
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	23,43	74,49	BB
2	Dinas Kesehatan	18,71	60,9	B
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22,99	61,47	B
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23,23	72,44	BB
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	25,85	71,29	BB
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	24,37	78,89	BB
7	Dinas Perhubungan	23,26	69,93	B
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	19,2	61,01	B
9	Dinas Lingkungan Hidup	21,4	76,37	BB
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22,2	62,71	B
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23,77	75,7	BB
12	Dinas Sosial	14,9	62,29	B

13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14,63	48,75	C
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	22,97	64,75	B
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	21,06	64,29	B
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18,83	54,41	CC
17	Satuan Polisi Pamong Praja	22,12	70,37	BB
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19,84	52,38	CC
19	Sekretariat Daerah	27,30	72,87	BB
20	Set. DPRD	24,48	71,27	BB
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26,58	75,68	BB
22	Inspektorat	25,85	71,51	BB
23	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	28,04	72,28	BB
24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23,89	67,37	B
25	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	16,61	62,71	B
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	24,98	72,82	BB
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	23,32	71,42	BB
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25,09	72,01	BB
29	Dinas Perkebunan dan Peternakan	26,42	76,26	BB
30	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	28,85	89,26	A
31	Kec. Tabunganen	19,54	55,01	CC
32	Kec. Tamban	22,52	63,63	B
33	Kec. Mekarsari	16,62	56,35	CC
34	Kec. Anjir Muara	22,22	70,48	BB
35	Kec. Anjir Pasar	19,68	57,16	CC
36	Kec. Alalak	25,42	68,65	B
37	Kec. Mandastana	23,03	62,94	B

38	Kec. Jejangkit	14,5	68,96	B
39	Kec. Rantau Badauh	21,37	68,22	B
40	Kec. Barambai	20,6	60,54	B
41	Kec. Wanaraya	11,06	51,7	CC
42	Kec. Belawang	19,51	61,05	B
43	Kec. Cerbon	26,68	72,84	BB
44	Kec. Bakumpai	22,22	68,45	B
45	Kec. Tabukan	19,65	55,65	CC
46	Kec. Marabahan	23,07	70,21	B
47	Kec. Kuripan	18,8	57,56	CC

Penyebab peningkatan capaian yang melebihi target pada indikator “Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja” adalah:

- 1) Bahwa semua SKPD sudah menyelesaikan dokumen perencanaan sesuai dengan outline yang telah ditetapkan.
- 2) Bahwa semua SKPD sudah menyerahkan dokumen perencanaan tepat waktu (foto terlampir).

- b) Sasaran Program 2 **“Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya”**, dengan menentukan satu indikator yaitu **“Nilai SAKIP SKPD Bidang Sosial Budaya yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja”**. Sasaran Program tersebut juga akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran Renstra **“Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”**.

Untuk mengukur kualitas dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) maka digunakan formulir E.73 dan E-75 pada Permendagri 86 tahun 2017 (data terlampir).

Rumus menghitung Indikator Ini adalah:

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Keseluruhan TPK SKPD Bidang Sosial Budaya}}{\sum \text{Jumlah SKPD Bidang Sosial Budaya}} \times 100\%$$

Tabel 3.10.

Target Capaian Nilai SAKIP SKPD Bidang Sosial Budaya dan Bidang Ekonomi & Fisik Prasarana

No	Tahun	Nilai Rata-Rata Komponen Perencanaan Kinerja (Sesuai Data Renstra Review Ke 3)	Target SKPD Bidang Sosbud	Target SKPD Bidang EF
1	2018	22,50	22,00	23,00
2	2019	23,30	22,00	24,60
3	2020	23,50	22,00	25,00
4	2021	23,75	22,00	25,50
5	2022	24,00	22,00	26,00

Tabel 3.11.

Capaian Nilai SAKIP SKPD Bidang Sosial Budaya

NO.	SKPD	Proyeksi Nilai SAKIP Tahun 2019		
		Renstra	Renja	TPK
1	Dinas Pendidikan	8,13	15,30	23,43
2	Dinas Kesehatan	6,06	12,65	18,71
3	RSUD Abd. Aziz	7,69	15,30	22,99
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9,09	16,00	25,09
5	DPPKBP3A	7,22	16,55	23,77
6	Disporbudpar	6,06	15,00	21,06
7	BKPP	8,94	19,10	28,04
8	Badan Kesbangpol	8,13	10,70	18,83
9	DPMPD	7,72	15,60	23,32
10	BPBD	7,44	12,40	19,84
11	Satpol PP	7,47	14,65	22,12
12	Disdukcapil	7,75	14,45	22,20
13	Dinsos	8,70	6,20	14,90
14	Sekretariat Daerah	8,70	18,60	27,30

15	Set. DPRD	8,63	15,85	24,48
16	Inspektorat	9,25	16,60	25,85
17	Kec. Tabunganen	6,44	13,10	19,54
18	Kec. Mekarsari	7,42	9,20	16,62
19	Kec. Wanaraya	6,56	4,50	11,06
20	Kec. Anjir Pasar	6,53	13,15	19,68
21	Kec. Anjir Muara	7,47	14,75	22,22
22	Kec. Rantau Badauh	7,22	14,15	21,37
23	Kec. Bakumpai	7,47	14,75	22,22
24	Kec. Marabahan	7,72	15,35	23,07
25	Kec. Mandastana	7,53	15,50	23,03
26	Kec. Alalak	8,57	16,85	25,42
27	Kec. Barambai	6,50	14,10	20,60
28	Kec. Belawang	7,66	11,85	19,51
29	Kec. Tamban	7,47	15,05	22,52
30	Kec. Tabukan	6,50	13,15	19,65
31	Kec. Kuripan	7,85	10,95	18,80
32	Kec. Cerbon	8,13	18,55	26,68
33	Kec. Jejangkit	4,50	10,00	14,50
Jumlah		248,52	459,90	708,42
Rata - rata		7,53	13,94	21,47

Tabel 3.12.
Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Program Bidang Sosial dan Budaya

Program	Indikator Program	Target	Capaian	Proyeksi Prosentase
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Nilai SAKIP SKPD (Bidang Sosial Budaya) yang Dicapai Dari Unsur Perencanaan Kinerja	22,00	21,47	97,58

Target Indikator Kinerja Program **"Nilai SAKIP SKPD Bidang Sosial Budaya yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja"** Pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 22,00% dari rata-rata nilai TPK SKPD Bidang Sosbud (33 SKPD) dengan Realisasi sebesar 21,47 (97,58 %). Dari target 22,00 % dibagi atas 7,33% capaian Renstra ($22,00 \times 1/3 = 7,33$) dan 14,66% capaian Renja ($22,00 \times 2/3 = 14,66$)

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target Indikator tersebut adalah **"Program Perencanaan Sosial dan Budaya"**.

Penyebab capaian yang mendekati target untuk indikator "Nilai SAKIP SKPD Bidang Sosial Budaya yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja" adalah:

1. Bahwa 33 SKPD Bidang Sosbud sudah menyelesaikan dokumen perencanaan sesuai dengan out line yang telah ditetapkan.
2. Bahwa ada SKPD (9 dari 33 SKPD = 27,27 %) yang sudah menyelesaikan dokumen Renstra sesuai dengan out line yang ditetapkan namun substansi masih bisa diperbaiki.
3. Bahwa ada SKPD (14 dari 33 SKPD = 42,42 %) yang sudah menyelesaikan dokumen Renja sesuai dengan out line yang ditetapkan namun substansi masih perlu diperbaiki.

- c) Sasaran Program 3 **"Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana"** dengan mengambil satu indikator kinerja, yaitu **"Nilai SAKIP SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja"**, indikator sasaran Program juga akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran Renstra **"Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"**.

Rumus menghitung untuk Indikator ini adalah:

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Keseluruhan TPK SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana}}{\sum \text{Jumlah SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana}} \times 100\%$$

Tabel 3.13.

Capaian Nilai SAKIP SKPD Bidang Ekonomi & Fisik Prasarana

NO.	SKPD	Proyeksi Nilai SAKIP Tahun 2019		
		Renstra	Renja	TPK

1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,58	15,65	23,23
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9,25	16,60	25,85
3	Dinas Perhubungan	8,21	15,05	23,26
4	Bappelitbang	8,57	15,50	24,07
5	Dinas Perkebunan dan Peternakan	8,22	18,20	26,42
6	BPKAD	7,78	18,80	26,58
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8,28	16,70	24,98
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,05	13,15	19,20
9	Dinas Lingkungan Hidup	10,00	11,40	21,40
10	BP2RD	8,35	16,61	9,00
11	Distan TPH	9,75	19,10	28,85
12	Diskopperindag	8,07	14,90	22,97
13	DPMPTSP	8,94	14,95	23,89
14	Disnakertrasn	6,58	8,05	14,63
Jumlah		115,54	206,40	321,94
Rata - rata		8,25	14,74	23,00

Tabel 3.14.
Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Program Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana

Program	Indikator Program	Target	Capaian	Prosentase
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana	Nilai SAKIP SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana yang Dicapai Dari Unsur Perencanaan Kinerja	24,60	23,00	93,49

Target Indikator Kinerja Program **"Nilai SAKIP SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja"** ditargetkan Tahun 2019 sebesar 24,60 % dari rata-rata nilai TPK SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana (14 SKPD) dengan realisasi target sebesar 23,00 (93,49 %). Dari target 24,60 % dibagi atas 8,2% capaian Renstra ($24,60 \times 1/3 = 8,2$) dan 16,4% capaian Renja ($24,60 \times 2/3 = 16,4$)

Program untuk mencapai Indikator tersebut adalah **"Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi"** dan **"Program Perencanaan Fisik Prasarana"**.

Penyebab tidak tercapainya target indikator **"Nilai SAKIP SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja"** adalah:

1. Bahwa semua SKPD (14 SKPD Mitra Ekofispra) sudah menyelesaikan dokumen perencanaan sesuai dengan out line yang telah ditetapkan
2. Bahwa ada SKPD (5 dari 14 SKPD = 35,7 %) yang sudah menyelesaikan dokumen Renstra sesuai dengan out line yang ditetapkan namun substansi masih bisa diperbaiki.
3. Bahwa ada SKPD (9 dari 14 SKPD = 64,28 %) yang sudah menyelesaikan dokumen Renja sesuai dengan out line yang ditetapkan namun substansi masih perlu diperbaiki.

d) Sasaran Program **"Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan Pembangunan"**, dengan mengambil satu Indikator Kinerja Program **"Capaian RFK SKPD"**, indikator sasaran program ini juga akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran Renstra **"Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"**.

(Rumus Perhitungan Indikator)

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Realiasi Pelaksanaan Pembangunan}}{\sum \text{Jumlah laporan Hasil Evaluasi Realiasi Pelaksanaan Pembangunan yang disusun}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja Program **"Capaian RFK SKPD"** sebesar 85,78 %.

Tabel 3.15.
Realisasi Indikator Program Bidang Pengendalian dan Penelitian
dan Pengembangan Tahun 2020

Program	Indikator Program	Target	Capaian	Prosentase
1	2	3	4	5
Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Capaian RFK SKPD (belanja langsung)	≥ 90	77,2	85,78

Penyebab tidak tercapainya target indikator **"Nilai Capaian RFK SKPD (Belanja Langsung)"** adalah:

1. Bahwa ada SKPD (1 dari 47 SKPD = 2,12.%) yang capaian RFK nya kurang dari 90%.
2. Nilai capaian yang rendah tersebut dikarenakan SKPD yang bersangkutan tidak melaksanakan input realisasi fisik dan keuangan pada Sitem Aplikasi RFK online.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai Target Indikator diatas adalah:

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
3. Program Perencanaan Fisik Prasarana
4. Program Kajian dan Penelitian
5. Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan

3.2.4. Analisis Kinerja Kegiatan

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Program maka dilaksanakan beberapa Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan masing-masing adalah ini :

a) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Laporan Proses Penyusunan Dokumen RKPD”

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan penyusunan Dokumen RKPD adalah berjumlah 6 dokumen, yaitu:

1. Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
2. Rancangan RKPD Tahun 2021
3. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021
4. RKPD Tahun 2021
5. RKPD Perubahan Tahun 2020
6. Draf Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Target Indikator Kinerja Kegiatan “**Jumlah Laporan Proses Penyusunan Dokumen RKPD**” sebesar 100 % atau 6 Dokumen. Tahun 2020 telah terealisasi sebesar 6 Dokumen, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100 %. Dalam menyusun 6 dokumen tersebut didasarkan pada rangkaian proses perencanaan dibawah ini yaitu:

1. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2021, yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Januari 2020, yang dibuka oleh Bupati Barito Kuala yang dihadiri oleh seluruh stakeholder perencanaan lingkup pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Hasil kegiatan ini diperoleh Berita Acara Konsultasi Publik dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.
2. Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 17 Februari 2020 di 17 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Musrenbang kecamatan dilaksanakan oleh SKPD kecamatan dan dihadiri oleh anggota DPRD (sesuai Daerah Pemilihan), SKPD lingkup Kabupaten Barito Kuala, Unsur Kecamatan, Kepala desa beserta delegasi desa. Hasil kegiatan ini

diperoleh Berita Acara Usulan Rencana Prioritas Kecamatan sebagai bahan Forum SKPD.

3. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan, yang dilaksanakan oleh Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan secara virtual dari Kota Surabaya Pada Tanggal 2 – 6 Maret 2020 dikarenakan pandemi covid-19. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bappelitbang Kab. Barito Kuala. Hasil kegiatan ini berupa Daftar Usulan program kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 yang akan didanai APBN.
4. Forum Perangkat Daerah, yang dilaksanakan di SKPD lingkup Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 3 s/d 11 Maret 2020. Kegiatan dihadiri oleh unsur SKPD masing-masing beserta stakeholdernya dan utusan Bappelitbang. Hasil kegiatan ini berupa Berita Acara Sinkronisasi Program Kegiatan.
5. Musrenbang Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Bappelitbang pada tanggal 18 Maret 2020. Acara ini dibuka oleh Bupati dan dihadiri oleh seluruh stakeholder perencanaan SKPD, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan dan anggota DPRD, delegasi/utusan kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan ini berupa Berita Acara Program Kegiatan Prioritas Tahun 2021, untuk bahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.
6. Forum Gabungan SKPD, yang dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang kabupaten pada 18 – 19 Maret 2020, dihadiri oleh seluruh stakeholder perencanaan/SKPD, anggota DPRD dari komisi terkait dan delegasi/utusan kecamatan. Hasil dari acara ini berupa Berita Acara Daftar Usulan Prioritas Tahun 2020 yang telah terkonfirmasi dan

untuk bahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021.

7. Musrenbang Provinsi, yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 April 2020 dilaksanakan secara virtual yang di ikuti oleh stakeholder perencanaan/SKPD provinsi, anggota DPRD dan DPR RI dan DPD Dapil Kalsel, SKPD Kabupaten Barito Kuala yang memiliki usulan APBD Provinsi dan APBN. Hasil kegiatan ini adalah Daftar Usulan program kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 yang akan didanai APBD Provinsi dan APBN dan juga sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2021 dan RKPD perubahan Tahun 2020.
8. Musrenbang Nasional, yang dilaksanakan oleh Beppenas di Jakarta pada tanggal 30 April 2020 pembukaan, dan Tri lateral desk 31 April - 11 Mei 2020 dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh stakeholder perencana di pusat, Bappeda Provinsi Kalsel, Bupati Barito Kuala. Hasil kegiatan ini adalah Daftar Usulan Prioritas program kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dengan sumber dana APBN yang akan dituangkan ke RKP Nasional T.A. 2021, dan juga sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2021 dan RKPD perubahan Tahun 2020.

Untuk Mencapai Indikator Kinerja diatas dilaksanakan dengan kegiatan "Penetapan RKPD" dengan anggaran Rp. 346.452.160,00.

- b) **Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati"**. Target Indikator Kinerja kegiatan **"Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati"** pada tahun 2020

adalah 100 %. Dimana dari 2 Dokumen RKPD yang disusun adalah:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
2. RKPD Perubahan 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Sehingga capaian dari Indikator kinerja kegiatan diatas pada tahun 2020 adalah 100 %.

Rumus menghitung untuk indikator ini adalah:

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen RKPD yang Ditetapkan}}{\text{Jumlah Dokumen RKPD yang Disusun}} \times 100\%$$

Untuk Mencapai Indikator Kinerja diatas dilaksanakan dengan Program adalah Program **“Perencanaan Pembangunan Daerah”**. Dan kegiatan “Penetapan RKPD” dengan anggaran Rp. 346.452.160,00.

Gambar 3.1

Buku RKPD Tahun 2020 Perubahan dan RKPD Tahun 2021



RKPD 2020 Perubahan



RKPD 2021

c) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Pemerintahan yang Selaras”

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini:

1. Asistensi Renstra/Renja SKPD
2. Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
3. Asistensi Anggaran SKPD
4. Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
5. Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional

SKPD mitra Sub Bidang Pemerintahan terdiri dari SKPD kecamatan lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Tabunganen
2. Kecamatan Tamban
3. Kecamatan Mekarsari
4. Kecamatan Anjir Pasar
5. Kecamatan Anjir Muara
6. Kecamatan Alalak

7. Kecamatan Mandastana
8. Kecamatan Belawang
9. Kecamatan Wanaraya
10. Kecamatan Barambai
11. Kecamatan Rantau Badauh
12. Kecamatan Cerbon
13. Kecamatan Bakumpai
14. Kecamatan Marabahan
15. Kecamatan Tabukan
16. Kecamatan Kuripan
17. Kecamatan Jejangkit

Target Indikator Kinerja Kegiatan **"Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Pemerintahan yang Selaras"** adalah sebesar 100 % atau 17 Dokumen Renstra/Renja dari 17 SKPD kecamatan lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dan untuk target nilai komponen perencanaan kinerja untuk SKPD Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Table 3.16.

Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja
Sub Bidang Pemerintahan Tahun 2019

NO.	SKPD	NILAI SAKIP TAHUN 2019								
		RENSTRA				RENJA				TPK
		PR	KR	IR	T1	PPKT	KPKT	IPKT	T2	
1	Kec. Tabunganen	1,78	3,91	0,75	6,44	3,00	8,00	2,10	13,10	19,54
2	Kec. Mekarsari	1,61	4,06	1,75	7,42	2,50	5,50	1,20	9,20	16,62
3	Kec. Wanaraya	1,78	3,28	1,50	6,56	2,50	2,00	0,00	4,50	11,06
4	Kec. Anjir Pasar	1,78	3,75	1,00	6,53	3,00	7,75	2,40	13,15	19,68
5	Kec. Anjir Muara	1,72	3,75	2,00	7,47	3,75	8,00	3,00	14,75	22,22
6	Kec. Rantau Badauh	1,72	3,75	1,75	7,22	3,75	8,00	2,40	14,15	21,37
7	Kec. Bakumpai	1,72	3,75	2,00	7,47	3,75	8,00	3,00	14,75	22,22
8	Kec. Marabahan	1,72	3,75	2,25	7,72	3,75	8,00	3,60	15,35	23,07
9	Kec. Mandastana	1,72	4,06	1,75	7,53	3,75	8,75	3,00	15,50	23,03
10	Kec. Alalak	1,94	4,38	2,25	8,57	4,00	9,25	3,60	16,85	25,42
11	Kec. Barambai	2,00	3,75	0,75	6,50	4,00	8,00	2,10	14,10	20,60
12	Kec. Belawang	2,00	3,91	1,75	7,66	4,00	7,25	0,60	11,85	19,51
13	Kec. Tamban	1,72	3,75	2,00	7,47	3,75	8,00	3,30	15,05	22,52
14	Kec. Tabukan	1,72	3,28	1,50	6,50	3,50	7,25	2,40	13,15	19,65
15	Kec. Kuripan	1,72	4,38	1,75	7,85	4,00	5,75	1,200	10,95	18,80
16	Kec. Cerbon	1,50	4,38	2,25	8,13	3,75	10,00	4,80	18,55	26,68
17	Kec. Jejangkit	1,00	2,00	1,50	4,50	2,00	5,00	3,00	10,00	14,50
Jumlah										346,49

- 1) Untuk nilai Renstra Tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,33 (perhitungan = $1/3 \times 22,00$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 7,15 ($121,54 : 17$ SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 97,54% (perhitungan = $7,15/7,33 \times 100\%$).
- 2) Untuk nilai Renja Tahun 2019 ditargetkan sebesar 14,66 (perhitungan = $2/3 \times 22,00$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 13,23 ($224,95 : 17$ SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 90,24% (perhitungan = $13,23/14,66 \times 100\%$).

Tabel 3.17.
Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub
Bidang Pemerintahan

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Renstra			Renja		
		Target	Realisasi Nilai	%	Target	Realisasi Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8

Meningkatnya Keselarasan Dokumen Sub Bidang Pemerintahan	Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Pemerintahan yang Selaras	7,33	7,15	97,54	14,66	13,23	90,24
--	---	------	------	-------	-------	-------	-------

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Pemerintahan dilaksanakan melalui Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran Rp 36.629.500,00.

d) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sosial dan Budaya yang Selaras”

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini:

1. Asistensi Renstra/Renja SKPD
2. Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
3. Asistensi Anggaran SKPD
4. Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
5. Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional

SKPD mitra Sub Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala antara lain sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Sekretariat Daerah
6. Sekretariat DPRD

7. Dinas Sosial
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Inspektorat

Target Indikator Kinerja Kegiatan **"Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sosial dan Budaya yang Selaras"** adalah sebesar 100 % atau 9 Dokumen Renstra/Renja dari 9 SKPD Mitra Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dan untuk target nilai komponen perencanaan kinerja untuk SKPD Sub Bidang Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut:

Table 3.18.
Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja
Sub Bidang Sosial dan Budaya Tahun 2019

NO.	SKPD	NILAI SAKIP TAHUN 2019								
		RENSTRA				RENJA				TPK
		PR	KR	IR	T1	PPKT	KPKT	IPKT	T2	
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,00	4,38	1,75	8,13	4,00	5,50	1,20	10,70	18,83
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,72	3,75	2,25	7,72	4,00	8,00	3,60	15,60	23,32
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,78	3,91	1,75	7,44	3,00	7,00	2,40	12,40	19,84
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2,00	4,22	1,25	7,47	5,00	7,25	2,40	14,65	22,12
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,00	3,75	2,00	7,75	3,75	8,00	2,70	14,45	22,20
6	Dinas Sosial	1,70	4,20	2,80	8,70	2,20	2,00	2,00	6,20	14,90
7	Sekretariat Daerah	2,00	4,30	2,40	8,70	3,80	9,80	5,00	18,60	27,30
8	Set. DPRD	2,00	4,38	2,25	8,63	3,75	8,50	3,60	15,85	24,48
9	Inspektorat	2,00	5,00	2,25	9,25	4,00	9,00	3,60	16,60	25,85
Jumlah		73,79				125,05				198,84

- 1) Untuk nilai Renstra Tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,33 (perhitungan = $1/3 \times 22,00$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 8,19 (73,79 : 9 SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 111,73% (perhitungan = $8,19/7,33 \times 100\%$).
- 2) Untuk nilai Renja Tahun 2019 ditargetkan sebesar 14,66 (perhitungan = $2/3 \times 22,00$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 13,89 (125,05 : 9 SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 94,75% (perhitungan = $13,89/14,66 \times 100\%$).

Tabel 3.19.
Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub
Bidang Sosial dan Budaya

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Renstra			Renja		
		Target	Realisasi Nilai	%	Target	Realisasi Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Sub Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sosial dan Budaya yang Selaras	7,33	8,19	111,73	14,66	13,89	94,75

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Sosial dan Budaya dilaksanakan melalui Kegiatan

“Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan”
dengan anggaran Rp 88.220.340,00.

e) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang Selaras”

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini:

1. Asistensi Renstra/Renja SKPD
2. Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
3. Asistensi Anggaran SKPD
4. Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
5. Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional

SKPD mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia terdiri dari SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7. Badan Kepegawian, Pendidikan dan Pelatihan

Target Indikator Kinerja Kegiatan **“Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang Selaras”** adalah sebesar 100 % atau 7 Dokumen

Renstra/Renja dari 7 SKPD Mitra lingkungan Pemerintah Kabuapten Barito Kuala. Dan untuk target nilai komponen perencanaan kinerja untuk SKPD Sub Bidang Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Table 3.20.

Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja
Sub Sumber Daya Manusia Tahun 2019

NO.	SKPD	NILAI SAKIP TAHUN 2019								
		RENSTRA				RENJA				TPK
		PR	KR	IR	T1	PPKT	KPKT	IPKT	T2	
1	Dinas Pendidikan	2,00	4,38	1,75	8,13	3,75	8,25	3,30	15,30	23,43
2	Dinas Kesehatan	2,00	2,81	1,25	6,06	4,00	6,25	2,40	12,65	18,71
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1,72	4,22	1,75	7,69	3,75	8,25	3,30	15,30	22,99
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2,00	4,84	2,25	9,09	4,00	9,00	3,00	16,00	25,09
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,00	4,22	1,00	7,22	4,00	9,25	3,30	16,55	23,77
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata	2,00	2,81	1,25	6,06	4,00	8,00	3,00	15,00	21,06
7	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2,00	4,69	2,25	8,94	4,00	10,00	5,10	19,10	28,04
Jumlah		53,19				109,90				163,09

- 1) Untuk nilai Renstra Tahun 2019 ditargetkan sebesar 7,33 (perhitungan = $1/3 \times 22,00$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 7,60 (53,19 : 7 SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 103,68% (perhitungan = $7,60/7,33 \times 100\%$).
- 2) Untuk nilai Renja Tahun 2019 ditargetkan sebesar 14,66 (perhitungan = $2/3 \times 22,00$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 15,70 (109,90 : 7 SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 107,09% (perhitungan = $15,70/14,66 \times 100\%$).

Tabel 3.21.

Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub
Bidang Sumber Daya Manusia

Kegiatan	Indikator	Renstra	Renja
----------	-----------	---------	-------

	Kegiatan	Target	Realiasi Nilai	%	Target	Realisasi Niali	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Menigkatnya Keselarasan Dokumen Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang Selaras	7,33	7,60	103,68	14,66	15,70	107,09

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui Kegiatan “Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia” dengan anggaran Rp 112.865.150,00.

f) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Ekonomi yang Selaras”

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini:

1. Asistensi Renstra/Renja SKPD
2. Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
3. Asistensi Anggaran SKPD
4. Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
5. Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional

SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi terdiri dari SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan
7. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
9. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan **"Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Ekonomi yang Selaras"** adalah sebesar 100 % atau 9 Dokumen Renstra/Renja dari 9 SKPD Mitra lingkungan Pemerintah Kabuapten Barito Kuala. Dan untuk target nilai komponen perencanaan kinerja untuk SKPD Sub Ekonomi adalah sebagai berikut:

Table 3.22.
Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja
Sub Bidang Ekonomi Tahun 2019

NO.	SKPD	NILAI SAKIP TAHUN 2019								
		RENSTRA				RENJA				TPK
		PR	KR	IR	T1	PPKT	KPKT	IPKT	T2	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,67	3,91	1,00	4,91	3,00	4,75	0,30	8,05	12,96
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,78	5,00	1,50	8,28	4,00	10,00	2,70	16,70	24,98
3	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	1,94	4,38	1,75	8,07	4,00	8,50	2,40	14,90	22,97
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,00	4,69	2,25	8,94	3,75	8,50	2,70	14,95	23,89
5	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2,00	5,00	2,75	9,75	4,00	10,00	5,10	19,10	28,85
6	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1,94	4,53	1,75	8,22	4,00	10,00	4,20	18,20	26,42
7	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1,94	4,38	2,25	7,47	4,00	8,50	3,00	15,50	22,97
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,00	4,53	1,25	7,78	4,00	10,00	4,00	18,00	25,78
9	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2,13	4,38	1,75	8,26	4,00	3,15	1,20	8,35	16,61
Jumlah		71,68				133,75				205,43

- 1) Untuk nilai Renstra Tahun 2019 ditargetkan sebesar 8,20 (perhitungan = $1/3 \times 24,60$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 7,96 ($71,68 : 9$ SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 97,07% (perhitungan = $7,96/8,20 \times 100\%$).
- 2) Untuk nilai Renja Tahun 2029 ditargetkan sebesar 16,40 (perhitungan = $2/3 \times 24,60$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 14,86 ($133,75 : 9$ SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 90,61% (perhitungan = $14,86/16,40 \times 100\%$).

Tabel 3.23.
Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub
Bidang Ekonomi

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Renstra			Renja		
		Target	Realisasi Nilai	%	Target	Realisasi Nilai	%
Menigkatnya Keselarasan Dokumen Sub Bidang Ekonomi	Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Ekonomi yang Selaras	8,20	7,96	97,07	16,40	14,86	90,61

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Ekonomi dilaksanakan melalui Kegiatan “Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi” dengan anggaran Rp 43.264.500,00.

g) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Fisik Prasarana yang Selaras”

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini:

1. Asistensi Renstra/Renja SKPD
2. Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
3. Asistensi Anggaran SKPD
4. Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
5. Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional

SKPD mitra Sub Bidang Fisik Prasaran terdiri dari SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman
3. Dinas Dinas Perhubungan
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Komunikasi dan Informatika

Target Indikator Kinerja Kegiatan **"Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Fisik Prasarana yang Selaras"** adalah sebesar 100 % atau 5 Dokumen Renstra/Renja dari 5 SKPD Mitra lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Dan untuk target nilai komponen perencanaan kinerja untuk SKPD Sub Fisik Prasarana adalah sebagai berikut:

Table 3.24.

**Capaian Nilai SAKIP Unsur Perencanaan Kinerja
Sub Bidang Fisik Prasarana Tahun 2019**

NO.	SKPD	NILAI SAKIP TAHUN 2019								
		RENSTRA				RENJA				TPK
1	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2,13	4,38	1,75	8,26	4,00	3,15	1,20	8,35	16,61
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,83	3,75	2,00	7,58	3,75	8,00	3,90	15,65	23,23
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2,00	5,00	2,25	9,25	4,00	9,00	3,60	16,60	25,85
4	Dinas Pehubungan	1,83	4,38	2,00	8,21	4,00	9,25	1,80	15,05	23,26
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,89	2,66	1,50	6,05	4,00	6,75	2,40	13,15	19,20
6	Dinas Lingkungan Hidup	2,00	5,00	3,00	10,00	4,00	5,00	2,40	11,40	21,40
Jumlah		49,35				80,20				129,55

- 1) Untuk nilai Renstra Tahun 2019 ditargetkan sebesar 8,20 (perhitungan = $1/3 \times 24,60$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 8,23 ($49,35 : 6$ SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 100,24% (perhitungan = $8,22/8,20 \times 100\%$).
- 2) Untuk nilai Renja Tahun 2019 ditargetkan sebesar 16,40 (perhitungan = $2/3 \times 24,60$) dan berdasarkan capaian pada table di atas diperoleh 13,37 ($80,20 : 6$ SKPD). Sehingga persentase capaiannya adalah 81,52% (perhitungan = $13,37/16,40 \times 100\%$).

Tabel 3.25

Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Sub
Bidang Fisik Prasarana

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Renstra			Renja		
		Target	Realisasi Nilai	%	Target	Realisasi Nilai	%
Meningkatnya Keselarasan Dokumen Sub Bidang Fisik Prasarana	Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Fisik Prasarana yang Selaras	8,20	8,23	100,24	16,40	13,37	81,52

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Fisik Prasarana dilaksanakan melalui Kegiatan “Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana” dengan anggaran Rp 338.016.040,00.

h) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah SKPD Bidang Sosial dan Budaya dengan Capaian Kinerja Sesuai Target”

Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya dengan sasaran memantau pelaksanaan dan capaian kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 untuk semua mitra SKPD Urusan Sosial dan Budaya yaitu:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Satuan Polisi Pamong Praja
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Dinasi Sosial
14. Sekretariat Daerah
15. Sekretariat DPRD
16. Inspektorat
17. Kecamatan Tabungan
18. Kecamatan Mekarsari
19. Kecamatan Wanaraya
20. Kecamatan Anjir Pasar
21. Kecamatan Anjir Muara
22. Kecamatan Rantau Badauh
23. Kecamatan Bakumpai
24. Kecamatan Marabahan
25. Kecamatan Mandastana
26. Kecamatan Alalak
27. Kecamatan Barambai
28. Kecamatan Belawang
29. Kecamatan Tamban
30. Kecamatan Tabukan
31. Kecamatan Kuripan
32. Kecamatan Cerbon
33. Kecamatan Jejangkit

Tabel 3.26.
Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja SKPD Sosial Budaya

SKPD	Realisasi	
	Fisik (%)	Keuangan (%)
1. Dinas Pendidikan	71,97	91,23
2. Dinas Kesehatan	96,7	91,66
3. RSUD H. Abdul Aziz Marabahan	95,9	95,9
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	97,30
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90,22	96,88
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata	99,92	99,28

7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	98,01	82,64
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	94,88
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99,62	99,85
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97,98	98,47
11. Satuan Polisi Pamong Praja	99,20	98,90
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,39	97,89
13. Dinas Sosial	96,43	96,32
14. Sekretariat Daerah	99,09	97,30
15. Sekretariat DPRD	90,66	92,21
16. Inspektorat	94,69	98,95
17. Kecamatan Tabunganen	99,91	101,82
18. Kecamatan Mekarsari	97,02	95,51
19. Kecamatan Wanaraya	99,93	101,64
20. Kecamatan Anjir Pasar	99,71	99,02
21. Kecamatan Anjir Muara	96,04	103,56
22. Kecamatan Rantau Badauh	99,91	102,8
23. Kecamatan Bakumpai	0	96,16
24. Kecamatan Marabahan	96,32	98,08
25. Kecamatan Mandastana	100,23	101,33
26. Kecamatan Alalak	96,57	97,74
27. Kecamatan Barambai	94,46	94,44
28. Kecamatan Belawang	99,99	103,69
29. Kecamatan Tamban	96,10	99,66
30. Kecamatan Tabukan	99,89	98,55
31. Kecamatan Kuripan	95,26	100,47
32. Kecamatan Cerbon	99,17	98,75
33. Kecamatan Jejangkit	100	93,63

1. Untuk SKPD Bidang Sosbud ada 16 SKPD yang realisasi keuangannya lebih besar dari pada realisasi fisiknya, hal ini dikarenakan pada saat refocusing anggaran, target tidak disesuaikan.
2. Ada 2 skpd yang realisasi fisiknya tidak ada (0) hal ini dikarenakan tidak mengentri (tidak melaporkan)
3. Ada 7 skpd yang ralisasi anggarannya lebih dari 100%, hal ini dikarenakan pergeseran setelah perubahan anggaran tidak terekam dalam sistem aplikasi.

Target Indikator Kinerja Kegiatan “**Jumlah SKPD Bidang Sosial Budaya dengan Capaian Kinerja Sesuai Target**” sebesar 100 % atau 16 laporan (12 laporan format I dan 4 laporan format II). Tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 16 laporan, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan diatas adalah 100 %. Kegiatan pemantauan tersebut dilaksanakan dengan didukung kegiatan “Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan”, dengan anggaran Rp 36.629.500,00. Sebelumnya Kegiatan ini bagian dari tupoksi bidang sosbud dan dengan adanya perubahan sotsk sesuai perbub nomor 47 tahun 2019 maka kegiatan ini dilaksanakan Bersama bidang pengendalian dan litbang (tusi pengendalian ada di bidang pengendalian dan litbang)

i) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana dengan Capaian Kinerja Sesuai Target”

Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana dengan sasaran memantau pelaksanaan dan capaian kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 untuk semua mitra SKPD Urusan Ekonomi dan Fisik Prasarana yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan
5. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 3.27.

Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja SKPD Fisik Prasarana

SKPD	Realisasi	
	Fisik (%)	Keuangan (%)
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98,85	100,02
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99,81	97,57
3. Dinas Perhubungan	93,20	94,55
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan	99,72	99,15
5. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	99,14	96,37
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	99,99	96,67
7. Dinas Komunikasi dan Informatika	95,54	98,41
8. Dinas Lingkungan Hidup	92,32	97,92
9. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	97,99	103,56
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	101,08	99,11
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	101,71
12. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	97,21	95,25
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	44,12
14. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah		

1. Untuk SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana ada 6 SKPD yang realisasi keuangannya lebih besar dari pada realisasi fisiknya dikarenakan pada saat refocusing anggaran, target tidak disesuaikan.
2. Ada 3 SKPD yang realisasi anggarannya lebih dari 100%, dikarenakan pergeseran setelah perubahan tidak terekam dalam sistem aplikasi.

3. Ada 1 skpd yang realisasi anggarannya kurang dari 50%, dikarenakan kesalahan pada sistem aplikasi.

Target Indikator Kinerja Kegiatan "**Jumlah SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana dengan Capaian Kinerja Sesuai Target**" sebesar 100 % atau 48 laporan (24 ekonomi dan 24 fisik prasarana). Tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 48 laporan, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan diatas adalah 100 %. Kegiatan pemantauan tersebut dilaksanakan dengan didukung kegiatan

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Ekonomi), dengan anggaran Rp 41.828.114,00
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Fisik Prasarana) dengan Anggaran Rp. 57.609.175,00.

j) Indikator Kinerja Kegiatan "Meningkatnya Jumlah Laporan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan"

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan dengan menyusun kajian penelitian. Pada akhir Tahun 2020 akibat adanya refocusing pandemi covid-19 jumlah kajian yang didisusun dari 2 kajian menjadi 1 kajian dan telah terealisasi sebanyak 1 Dokumen Kajian. Sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah 100 %. Adapun Judul dokumen hasil penelitian tersebut adalah **Kajian Pola Konsumsi Pangan Integrasi Usaha Tanaman Pangan dan Kelapa Sawit di Kab. Barito Kuala.**

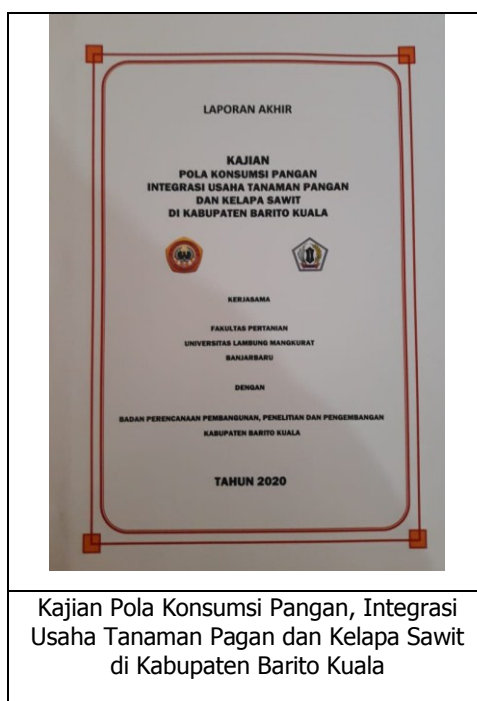
Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan didukung kegiatan

1. "Identifikasi Permasalahan Pembangunan", dengan anggaran Rp 98.610.614,00 dan

- 2 "Pengembangan dan Diseminasi Bidang Ekonomi Fisik Prasarana dan Sosial Budaya", dengan Anggaran Rp. 31.565.000,00.



Gambar 3.2
Dokumen Hasil Penelitian



3.2.5. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Serta Indikator Kinerja Kegiatan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

Tabel 3.28.

Sasaran dan Indikator Kinerja Program Serta Indikator Kinerja Kegiatan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari unsur	Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan	Jumlah Laporan Proses Penyusunan dokumen RKP	Penetapan RKP
			Dokumen RKP	

	perencanaan	Kinerja	yang Ditetapkan Dengan Peraturan Bupati	
		Nilai SAKIP SKPD Sosbud yang dicapai dari unsur Perencanaan	Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang pemerintahan yang selaras	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Sosial dan Budaya)
			Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sosial dan Budaya yang selaras	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan
			Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sumber Daya Manusia yang selaras	Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia
		Nilai SAKIP SKPD Ekofispra yang dicapai dari unsur Perencanaan	Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Ekonomi yang selaras	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
			Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Fisik Prasarana yang selaras	Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana
		Capaian RFK SKPD	Jumlah SKPD Bidang Sosial dan Budaya dengan Capaian Kinerja Sesuai Target	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Sosial dan Budaya)
			Jumlah SKPD Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana dengan Capaian Kinerja Sesuai Target	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Ekonomi) Monitoing, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Fisik Prasarana)

			Jumlah Kajian yang disusun	Identifikasi Permasalahan Pembangunan
				Pengembangan dan Diseminasi Bidang Ekonomi Fisik Prasarana dan Sosial budaya

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappelitbang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 6.481.401.312,00. Kemudian dengan adanya refocusing akibat dampak pandemic covid-19 pada bulan April dan perubahan anggaran pada bulan September tahun 2020 maka anggaran bappelitbang menjadi Rp. 5.424.772.325,00. Realisasi anggaran di akhir tahun 2020 mencapai Rp 5.167.008.653,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,25 %.

Tabel 3.29.
Komposisi Belanja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2020

NO	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.835.033.060,00	2.760.792.455,00	97,38
2	Belanja Langsung	2.589.739.265,00	2.406.216.198,00	92,91
	Jumlah	5.424.772.325,00	5.167.008.653,00	95,25

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 92,91 % terhadap realisasi belanja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, dan 97,38 % untuk Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan).

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.714.765.593,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.588.925.912,00 atau 92,66 %, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30.
Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian
Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realiasi	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai AKuntabilitas Kinerja Pemerintah dari unsur Perencanaan	Nilai	22,07	22,04	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	346.452.160,-	345.114.394,-
					2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	604.797.614,-	516.293.672,-
					3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya	237.714.990,-	235.467.792,-
					4. Program Kajian dan Penelitian	98.610.614,-	91.918.780,-
					5. Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan	31,565.000	24.807.561,-
					6. Program Perencanaan Fisik	395.625.215,-	375.324.713,-

					dan Prasarana		
Jumlah						1.714.765.593,-	1.588.925.912,-

Tabel 3.31.
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Bappelitbang
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.714.765.593,00	1.588.925.912,00	92,66

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.32.
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran (rata-rata)	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1	99,86	1.588.925.912,-	92,66

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif/~~kurang efektif/tidak efektif~~ terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala.

Efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja rata-rata sebesar 99,86% ($=22,07:22,04 \times 100$), dibandingkan dengan Tabel. 3.1. maka pencapaian kinerja sebesar 99,86% termasuk pada Kriteria **Sangat Baik**. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Bappelitbang pada Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang Tahun 2017-2022. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak internal maupun eksternal Bappelitbang, dan diharapkan hal ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara target yang belum tercapai, kedepan harus diantisipasi dan dicapai agar target dapat tercapai bahkan terlampaui.

Hasil laporan kinerja Bappelitbang Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis Sasaran Perangkat Daerah (Bappelitbang) "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah", dengan Indikator "Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Unsur Perencanaan". Realisasi kinerja Bappelitbang pada Tahun 2020 adalah 96,73% (22,04 dari 22,07).
2. Realisasi kinerja Bappelitbang 99,86% masuk pada interval nilai $76 \leq 90$ dan masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja **Sangat Baik**, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,75 %.

LAMPIRAN 1

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2020
 SKPD / ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 BULAN : 12 DESEMBER

FORM 1

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM				BOBOT	URAIAN SINGKAT PROSES
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
		SEBUTAN OUPUT	JUMLAH	PAGU (RP)	JUMLAH	%	PAGU RP	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	URUSAN PILIHAN									
3	PERENCANAAN									
	SUB UNIT=BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
0	PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG			2.835.033.060,00		100,00	2.760.792.455,00		100,00	
0.0	Non Kegiatan	Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS (14 bln), Tambahan Penghasilan Lainnya (12 bln)	26,00	2.835.033.060,00	26,00	100,00	2.760.792.455,00	97,38	100,00	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Optimalisasi Pelayanan Perkantoran		533.010.735,00		97,40	493.281.105,00	92,55	18,10	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengadaan Benda Pos (Materai)	272,00	1.604.000,00	272,00	100,00	1.588.000,00	99,00	0,06	
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Langganan Listrik, PDAM, Telepon dan Internet	48,00	90.780.000,00	48,00	100,00	83.146.582,00	91,59	3,51	
1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK Mobil /kendaraan yang dibayar(16 Unit).	16,00	6.800.000,00	16,00	100,00	3.861.800,00	56,79	0,26	
1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan yang disediakan (15 jenis).	15,00	30.413.200,00	15,00	100,00	26.216.000,00	86,20	1,17	
1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan(192 buah). (14 jenis)	14,00	51.939.135,00	14,00	100,00	50.333.500,00	96,91	2,21	
1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan buku/berkas kantor(5 Jenis). Jumlah penggandaan yang disediakan(168 buah). (5 jenis)	5,00	35.600.000,00	5,00	100,00	35.562.000,00	99,89	1,37	
1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor(7 Jenis).	7,00	7.135.400,00	7,00	100,00	7.135.000,00	99,99	0,28	
1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan (44 Buah). (39 buah)	39,00	7.550.000,00	39,00	100,00	7.550.000,00	100,00	0,29	
1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar harian/media cetak dan Jumlah buku peraturan PP (60 Eksampler).	60,00	6.300.000,00	60,00	100,00	4.920.000,00	78,10	0,24	
1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu dan rapat(13023 Porsi).	12.241,00	69.853.000,00	12.241,00	100,00	68.577.000,00	98,17	2,7	
1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah (15 Laporan). (49 laporan)	49,00	225.036.000,00	35,00	71,43	204.391.223,00	90,83	6,21	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Yang Memadai		271.761.972,00		100,00	255.490.281,00	94,01	10,5	
2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua untuk kantor Bappelitbang Kab. Barito Kuala(1 Buah).	1,00	24.350.000,00	1,00	100,00	23.450.000,00	96,30	0,94	
2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor(17 Buah). (6 buah)	6,00	14.684.972,00	6,00	100,00	14.684.000,00	99,99	0,57	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM				BOBOT	URAIAN SINGKAT PROSES
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
		SEBUTAN OUPUT	JUMLAH	PAGU (RP)	JUMLAH	%	PAGU RP	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor(8 Buah).	8,00	59.100.000,00	8,00	100,00	58.580.000,00	99,12	2,28	
2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik (Pengecatan pagar dan kantor)(1 unit). (5 unit/paket)	5,00	92.477.000,00	5,00	100,00	91.739.100,00	99,20	3,57	
2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang siap operasional(36 kali).	36,00	60.250.000,00	36,00	100,00	49.593.781,00	82,31	2,33	
2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara dan siap operasional (48 Buah). (16 buah)	16,00	12.340.000,00	16,00	100,00	9.310.000,00	75,45	0,48	
2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipeliharhan dan siap operasional (36 Buah). (12 buah)	12,00	8.560.000,00	12,00	100,00	8.133.400,00	95,02	0,33	
6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas		70.200.965,00		100,00	68.517.890,00	97,60		
6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya lapoaran capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja secara periodik, tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen SAKIP Bappelitbang serta terlaksananya keikutsertaan dalam even pameran daerah dan peringatan hari besar (31 Laporan)	31,00	70.200.965,00	31,00	100,00	68.517.890,00	97,60	2,71	
21	ROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Menjamin Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas.		346.452.160,00		100,00	345.114.394,00	99,61	13,38	
21 .10	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan.(6 Dokumen).	6,00	346.452.160,00	6,00	100,00	345.114.394,00	99,61	13,38	
22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Menjamin Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas.		604.797.614,00		100,00	516.293.672,00	85,37	23,36	
22 .4	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Barito Kuala(36 Dokumen).	36,00	43.264.500,00	36,00	100,00	38.998.313,00	90,14	1,67	
22 .8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi(16 Laporan).	24,00	41.828.114,00	24,00	100,00	35.069.500,00	83,84	1,62	
22 .10	Perencanaan pembangunan bidang ekonomi (IPDMIP)	Dokumen profil sosial ekonomi teknis kelembagaankab. batola dan laporan kegiatan IPDMIP(64 Dokumen).	64,00	519.705.000,00	64,00	100,00	442.225.859,00	85,09	20,07	
23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Menjamin Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas.		237.714.990,00		100,00	235.467.792,00	99,05	9,18	
23 .4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya(16 Laporan).	16,00	36.629.500,00	16,00	100,00	35.575.541,00	97,12	1,41	
23 .10	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah dokumen Renstra / Renja SKPD Urusan Sosial dan Pemerinthan yang di asistensi (104 Dokumen Renstra, Renja dan 6 kali Rakor).	34,00	112.865.150,00	34,00	100,00	111.795.900,00	99,05	4,36	
23 .11	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah dokumen Renstra / Renja SKPD Urusan Sosial dan Pemerinthan yang di asistensi (104 Dokumen Renstra, Renja dan 6 kali Rakor).	110,00	88.220.340,00	110,00	100,00	88.096.351,00	99,86	341	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN			REALISASI CAPAIAN PROGRAM				BOBOT	URAIAN SINGKAT PROSES
		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
		SEBUTAN OUPUT	JUMLAH	PAGU (RP)	JUMLAH	%	PAGU RP	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	PROGRAM KAJIAN DAN PENELITIAN	Merekomendasikan Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan.		98.610.614,00		100,00	91.918.780,00	93,21	3,81	
27 .1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan	Jumlah dokumen identifikasi permasalahan pembangunan(2 Judul).	1,00	98.610.614,00	1,00	100,00	91.918.780,00	93,21	3,81	
28	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Merekomendasikan Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan.		31.565.000,00		100,00	24.807.561,00	78,59	1,22	
28 .1	Pengembangan dan Diseminasi Bidang Ekonomi Fisik Prasarana & Sosial Budaya	Jumlah kajian atau penelitian yang didiseminasikan (2 Kajian/ penelitian).	1,00	31.565.000,00	1,00	100,00	24.807.561,00	78,59	1,22	
29	PROGRAM PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA	Menjamin Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas.		395.625.215,00		100,00	375.324.713,00	94,87	2,84	
29 .1	Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan fisik perencanaan fisik prasarana Kabupaten Barito Kuala (21 Dokumen).	21,00	338.016.040,00	21,00	100,00	320.063.097,00	94,69	0,62	
29 .3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Fisik Prsarana.(16 Dokumen).	24,00	57.609.175	24	100,00	55.261.616,00	95,93	2,22	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		2.589.739.265,00			99,71	2.406.216.188,00	92,91	85,1	
	JUMLAH TOTAL		5.424.772.325,00			99,86	5.167.008.643	95,25	92,55	

Kesimpulan

1	Nilai Rata-Rata Realisasi Fisik (berdasarkan jumlah prosentasi realisasi out put seluruh kegiatan)	99,86
2	Prosentasi Penggunaan Keuangan (berdasarkan jumlah in put/pagu seluruh kegiatan)	95,25
3	Nilai Rata-Rata Pencapaian Program (berdasarkan jumlah rata-rata dari prosentasi pencapaian out put semua kegiatan dari masing-masing program)	99,71
4	Total Bobot Tertimbang = Jumlah Prosentasi Semua Capaian Kegiatan (diukur dari capaian out put berdasarkan Bobot Kegiatannya)	92,55

MARABAHAN, 5 JANUARI 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M. Sc
NIP. 196607051992031016

LAMPIRAN 2

KESELARASAN KINERJA OUTPUT-PENGANGGARAN TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO KUALA

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI HASIL (Ya/Tidak)	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/ Bukan IKU	NO	PRORAM			SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)	KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN PROGRAM (Ya/Tidak)	ANGGARAN (Rp)		CATATAN					
								URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT						
1	Terwujudnya Perencanaan Daerah yang Berkualitas	Ya	1	Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	Ya	IKU	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Ya	1		Terlaksananya penyusunan dokumen RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang di-susun.	Ya		Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka nama kegiatan ini berubah menjadi Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota					
											2												
											3	Penetapan RKPD	346.452.160,00										
							2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang Ekofispra	1. Nilai SAKIP SKPD ekofispra yang dicapai dari unsur perencanaan	Ya	1	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan sub bidang .Ekonomi	Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Ekonomi yang selaras	Ya	43.264.500,00	Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka nama kegiatan ini berubah menjadi Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).					
										</													

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak)	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/ Bukan IKU	NO	PRORAM			SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)	KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN PROGRAM (Ya/Tidak)	ANGGARAN (Rp)		CATATAN	
								URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT		
							4	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Nilai SAKIP SKPD Sosbud yang dicapai dari unsur perencanaan	Ya	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Peogram dan Kegiatan SKPD Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah SKPD bidang Sosial dan Budaya dengan capaian Kinerja sesuai target	Ya	36.629.500,00		Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka nama kegiatan ini berubah menjadi Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	
												Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan sub bidang Sumber Daya manusia	Jumlah Renstra / Renja SKPD Sub. Bidang Sumber Daya Manusia Yang Selaras	Ya	112.865.150,00		Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka nama kegiatan ini berubah menjadi Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Pelaksanaan Pembagunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
												Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan sub bidang Pemerintahan	Jumlah Renstra / Renja SKPD Sub. Bidang Pemerintahan Yang Selaras	Ya	88.220.340,00		Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka nama kegiatan ini berubah menjadi Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	
							5	Program Kajian Dan Penelitian	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Capaian RFK SKPD	Ya	1	Identifikasi Permasalahan Pembangunan	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Capaian RFK SKPD	Ya	98.610.614,00		Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka nama kegiatan ini berubah menjadi Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
							6	Program Penguatan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Capaian RFK SKPD	Ya	1	Pengembangan dan Diseminasi Bidang Ekofispra Dan Sosbud	Meningkatnya Realisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Capaian RFK SKPD	Ya	31.565.000,00		Pada Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 maka nama kegiatan ini berubah menjadi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya optimalisasi pelayanan perkantoran			1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pengadaan Benda Pos 272 Lembar		1.604.000,00		Program/kegiatan pendukung-ada pada semua SKPD	
												2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Langganan Listrik, PDAM, Telepon dan Internet 48 Bulan		90.780.000,00			
												3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak STNK Mobil / Kendaraan yang Dibayar 16 Buah		6.800.000,00			
												4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis Alat dan Bahan Kebersihan Yang Disediakan 16 Jenis		34.301.000,00			
												5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan		51.939.135,00			

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak)	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/ Bukan IKU	PRORAM			SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)	KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN PROGRAM (Ya/Tidak)	ANGGARAN (Rp)		CATATAN		
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT			
											6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Jenis Cetakan Buku / Berkas Kantor dan Jumlah Jenis Penggandaan Yang		35.600.000,00			
											7	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Jumlah Jenis Pembelian Komponen Listrik Penerangan Bangunan Kantor 7 Jenis		7.135.400,00			
											8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 39 Buah		7.550.000,00			
											9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian / Media Cetak dan Jumlah Buku Peraturan Perundang - undangan 60		6.300.000,00			
											10	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Porsi Makan dan Minum Untuk Harian Pegawai, Tamu dan Rapat 12241 Porsi		69.853.000,00			
											11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 22 Laporan		122.368.000,00			
								8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai		1	Pembangunan Gedung Kantor+035.S35		Pembangunan tempat pertemuan dan pembangunan gudang/ rumah genset (2 Buah)		-		Program/kegiatan pendukung-ada pada semua SKPD
												2	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional		Pengadaan kendaraan dinas/operasional (1 Buah)		24.350.000,00		
												3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Pengadaan perlengkapan kantor 6 Buah		14.684.972,00		
												4	Pengadaan peralatan gedung kantor		Pengadaan peralatan kantor 8 buah		59.100.000,00		
												5	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Jumlah bangunan Gedung Kantor yg terpelihara dan kondisi baik (pengecatan pagar dan kantor) (1 unit)		92.477.000,00		
												6	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 9 Buah		60.250.000,00		
												7	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor		Jumlah Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara dan Siap Operasional 16 Buah		12.340.000,00		
												8	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12 Buah)		8.560.000,00		
								9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Yang Profesional Dibidang Perencanaan Pembangunan		1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan		Penugas pegawai untuk mengikuti diklat di bidang terkait dengan perencanaan (3 IPeserta)		-		Program/kegiatan pendukung-ada pada semua SKPD
												1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Tersusunnya laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja secara periodik, tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen SAKIP bappelitbang serta terlaksananya keikut sertaan dalam event pameran daerah dan peringatan hari besar keagamaan 31 Dokumen/Laporan		70.200.965,00		Program/kegiatan pendukung-ada pada semua SKPD
									10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja yang disinkronisasi dan berkualitas		1	Non kegiatan		Gaji dan tunjangan plus Tambahan Penghasilan Pegawai		2.835.033.060,00	
						11	Belanja Tidak Langsung												

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak)	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	IKU/ Bukan IKU	NO	PRORAM			SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN STRATEGIS (Ya/Tidak)		KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN PROGRAM (Ya/Tidak)	ANGGARAN (Rp)		CATATAN
								URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM			URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
																JUMLAH BELANJA LANGSUNG	5.373.382.950,00	0,00	

Marabahan, April 2021
Kepala Bappeltbang
Kabupaten Barito Kuala

Ir. H. Zulkipli Yadi Noor. M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19660705 199203 1 016

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN 4

LAMPIRAN 5



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2017-2022**



KECAMATAN KURIPAN



**RANCANGAN AKHIR
RENJA TAHUN 2020**



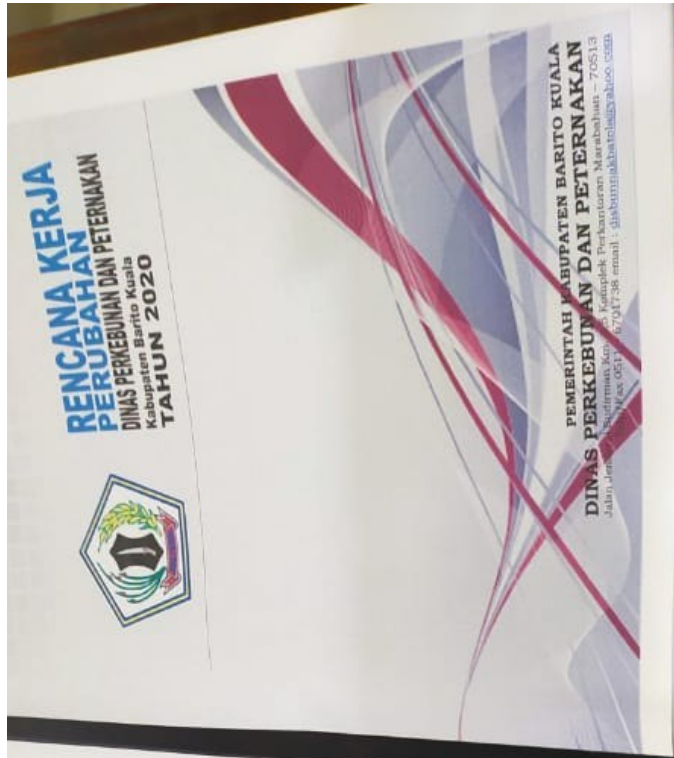
KECAMATAN KURIPAN



**RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**



KECAMATAN KURIPAN







PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN CERBON

RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)
TAHUN 2017-2022



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN CERBON



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2020



KECAMATAN CERBON

AUGUSTUS 2017

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN RANTAU BADAUH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN RANTAU BADAUH



RANCANGAN AKHIR
RENJA TAHUN 2020



KECAMATAN RANTAU BADAUH



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



KECAMATAN RANTAU BADAUH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TABUNGANEN
TAHUN 2017 – 2022



KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN TABUNGANEN
TAHUN 2017

RENJA AKHIR 2020
KANTOR KECAMATAN TABUNGANEN

*Uji. Pdt. Pdt. -
Uji. Pdt. Pdt. -
Uji. Pdt. Pdt. -*

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KANTOR KECAMATAN TABUNGANEN
2019



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



KECAMATAN TABUNGANEN

NOV
16/10



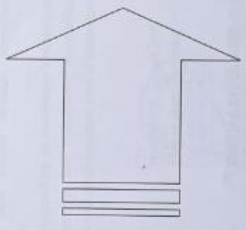
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN MANDASTANA
KABUPATEN BARITOKUALA
TAHUN 2017 - 2022

KECAMATAN MANDASTANA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017



RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
KECAMATAN MANDASTANA



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MANDASTANA
TAHUN 2019



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020

KECAMATAN MANDASTANA



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2017-2022**



Monet bioindustri rinasak-sapi
-1.60044, 103.67046, 323°

KECAMATAN TAMBAN



**RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**



Monet bioindustri rinasak-sapi
-1.60044, 103.67046, 323°

KECAMATAN TAMBAN



**RANCANGAN AKHIR RENJA
TAHUN 2020**



Monet bioindustri rinasak-sapi
-1.60044, 103.67046, 323°

KECAMATAN TAMBAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



KECAMATAN ANJIR PASAR
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017-2022



RANCANGAN AKHIR
RENJA TAHUN 2020



KECAMATAN ANJIR PASAR



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



KECAMATAN ANJIR PASAR



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2017-2022**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BARITO KUALA**



**RANCANGAN AKHIR RENJA
TAHUN 2020**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BARITO KUALA**



**RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

2017 - 2022

KECAMATAN
BARAMBAI
KAB. BARITO KUALA

RENCANA KERJA
(RENJA AKHIR)

KECAMATAN BARAMBAI

TAHUN 2020



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



KECAMATAN BARAMBAI



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2017 – 2022**

**KECAMATAN BAKUMPAI
KABUPATEN BARITO KUALA**

TAHUN 2017



**KECAMATAN BAKUMPAI
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2028**



**RENCANA KERJA
KECAMATAN BAKUMPAI
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN BAKUMPAI
2019**



**RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**



KECAMATAN BAKUMPAI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

2017 - 2022

KECAMATAN
BARAMBAL
KAB. BARITO KUALA

RENCANA KERJA
(RENJA)

KECAMATAN BARAMBAL

KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2020



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



KECAMATAN BARAMBAL



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020

KECAMATAN ANJIR MUARA



RANCANGAN AKHIR
RENJA TAHUN 2020

KECAMATAN ANJIR MUARA



RANCANA STRATEGIS
KECAMATAN ANJIR MUARA
TAHUN 2017-2022

KECAMATAN ANJIR MUARA

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MARABAHAN
2017-2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018**



**RENCANA AKHIR
REVISI TAHUN 2020**



KECAMATAN MARABAHAN



**REVISI PERUBAHAN
TAHUN 2020**



KECAMATAN MARABAHAN



KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN ALALAK

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2017-2022

Marabahan
2018



RENCANA AKHIR TAHUN 2020

KECAMATAN ALALAK



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



KECAMATAN ALALAK



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITOKUALA
TAHUN 2017 - 2022

KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017



RENCANA KERJA (RENJA) 2020

KECAMATAN BELAWANG
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2020

KECAMATAN BELAWANG



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2017-2022



KECAMATAN TABUKAN



RANCANGAN AKHIR
RENJA TAHUN 2020



KECAMATAN TABUKAN

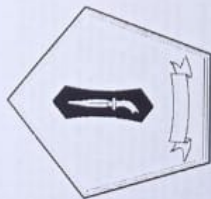


RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



KECAMATAN TABUKAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SKPD KECAMATAN MEKARSARI
TAHUN 2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN MEKARSARI
JULI 2018

RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2020



KECAMATAN MEKARSARI
KABUPATEN BARITO KUALA



RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



KECAMATAN MEKARSARI



**RENCANA PERUBAHAN
TAHUN 2020 RENJA**



KECAMATAN JEJANGKIT

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020**



**KECAMATAN JEJANGKIT
KABUPATEN BARITO KUALA
2019**



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JEJANGKIT TAHUN 2019-2022**



KECAMATAN JEJANGKIT



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2017-2022**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**



**RANCANGAN AKHIR RENJA
TAHUN 2020**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2020

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WANARAYA KABUPATEN BARITO
KUALA TAHUN 2017 - 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN WANARAYA
TAHUN 2018

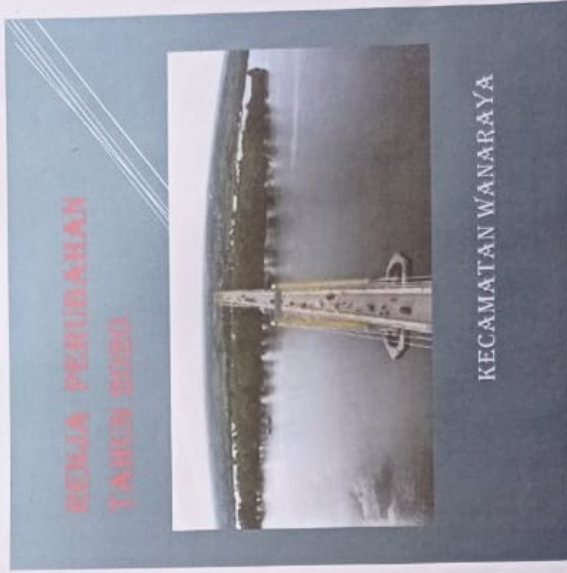


KECAMATAN WANARAYA
KABUPATEN BARITO KUALA

Rencana Kerja (Renja) adalah
perencanaan pengikat daerah untuk
periode (satu) tahun.

Berdasarkan PKA
Permenadap Nomor 86 Tahun 2018

RENCANA KERJA
2020





Маълумот: info@pmb.gov.tj Ҳаётини қўқор: prob@pmb.gov.tj
ҚАВМБАТЕН ВАРЛО ҚИЛҶ
БЕДИДИҚИ ДИИ БЕҶАЛНИИ
БАДДИ КЕРЕМАТИИ



ТАННИ 2012-2022
БЕНИ
БЕНИСНИ СТРАТЕГИ (БЕНИСТРА)

Маълумот: info@pmb.gov.tj Ҳаётини қўқор: prob@pmb.gov.tj

ҚАВМБАТЕН ВАРЛО ҚИЛҶ
БАДДИ КЕРЕМАТИИ БЕДИДИҚИ ДИИ БЕҶАЛНИИ

ТАННИ 2020
БЕНИСНИИ УҚНИИ БЕНИ



Маълумот: info@pmb.gov.tj Ҳаётини қўқор: prob@pmb.gov.tj

ҚАВМБАТЕН ВАРЛО ҚИЛҶ
БАДДИ КЕРЕМАТИИ БЕДИДИҚИ ДИИ БЕҶАЛНИИ

ТАННИ 2020
БЕНИИ БЕҶУБАНИИ





КАРПУАТЕН ВАРШО КИТА

БЕВЕДОУАНА РЕВЕРИНА ДИЛЕРИДИНГАНА УНАК
ДИНАЗ РЕВЕРИДИНА РЕВЕРИДИН КЕТНАРГА РЕВЕРИНА

ТАНУН 5017 - 5035

РЕНСАНА СТРАТЕГИ (РЕНСТРА)



КАРПУАТЕН ВАРШО КИТА

ТАНУН 5018

КАРПУАТЕН ВАРШО КИТА

ДИНАЗ РЕВЕРИДИНА РЕВЕРИДИН

БЕВЕДОУАНА РЕВЕРИНА

ДИНАЗ РЕВЕРИДИНА РЕВЕРИДИН КЕТНАРГА



ТАНУН 5050

РЕНСАНА КЕРТА

13

КАРПУАТЕН ВАРШО КИТА
ДИНАЗ РЕВЕРИДИНА РЕВЕРИДИН
БЕВЕДОУАНА РЕВЕРИДИН
ДИНАЗ РЕВЕРИДИНА РЕВЕРИДИН КЕТНАРГА

ТАНУН 5050

ВРБД

БЕРУВАНА

КЕРТА

РЕНСАНА

УСУТА



15





RENCANA KERJA
(RENJA PERUBAHAN)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
MARABAHAN
2020

RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
MARABAHAN
2020

RENSTRA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2017 - 2022

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

RENJA PERUBAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020

JALAN JENDERAL SUDEMAN NOMOR 61 KOMPLEK PERPUSTAKAAN
BARABAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020

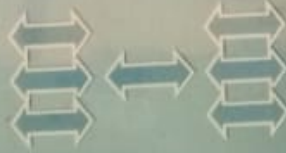


DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2019

JALAN JENDERAL SUDEMAN NOMOR 61 KOMPLEK PERPUSTAKAAN
BARABAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022



DI BUAT OLEH :
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA
JALAN JENDERAL SUDEMAN NOMOR 61 KOMPLEK PERPUSTAKAAN
BARABAHAN

DINAS
DUKCAPIL
BATOLA



RENCANA KERJA
PERUBAHAN
TAHUN 2020

DINAS DUKCAPIL BATOLA
DINAS DUKCAPIL BATOLA
DINAS DUKCAPIL BATOLA

DINAS
DUKCAPIL
BATOLA



RENCANA KERJA AKHIR
TAHUN 2020

DINAS DUKCAPIL BATOLA
DINAS DUKCAPIL BATOLA
DINAS DUKCAPIL BATOLA

DINAS
DUKCAPIL
BATOLA



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2017 - 2022

DINAS DUKCAPIL BATOLA
DINAS DUKCAPIL BATOLA
DINAS DUKCAPIL BATOLA

TAHUN 2012 - 2023
KABUPATEN BAYILLO KUALA
DINAS PEMERIDAYUAN MASYARAKAT DAN DESA



(RENCANA)
RENCANA STRATEGIS
REVISI I



Jl. Pahlawan Gajahmudi No. 62, Telok (031) 418323, Mampangan
DINAS PEMERIDAYUAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BAYILLO KUALA



TAHUN 2020
KABUPATEN BAYILLO KUALA
DINAS PEMERIDAYUAN MASYARAKAT DAN DESA
RANCANGAN AKHIR RENCANA



Jl. Pahlawan Gajahmudi No. 62, Telok (031) 418323, Mampangan
DINAS PEMERIDAYUAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN BAYILLO KUALA

TAHUN 2020
KABUPATEN BAYILLO KUALA
DINAS PEMERIDAYUAN MASYARAKAT DAN DESA
RENCANA PERUBAHAN



**RENCANA STRATEGIS
2017-2022**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018**

**RANCANGAN
AKHIR RENJA
TAHUN 2020**



JL. JENDERAL SUDIRMAN 79, KOMPLEK PERKANTORAN
MARABAHAN (70513), TELP. (0511) 4799940



**RENJA
PERUBAHAN
TAHUN 2020**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA**

JL. JENDERAL SUDIRMAN 79, KOMPLEK PERKANTORAN MARABAHAN (70513),
TELP. (0511) 4799940

TAHUN 2020
KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIAT DAERAH



(REVISI)
RENCANA KERJA

TAHUN 2017-2022
KAB. BARITO KUALA
SEKRETARIAT DAERAH



REVISI
(REVISI)
RENCANA STRATEGIS

U. P. VETERAN NO. 1, TEL. 0911-430041 MANAGER KOTAMADYA BARITO KUALA

KAB. BARITO KUALA
PEMERINTAH DAERAH



TAHUN 2020
KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIAT DAERAH



PERUBAHAN
RENCANA KERJA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
REVIT
TAHUN 2017-2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BARITO KUALA

MARABAHAN

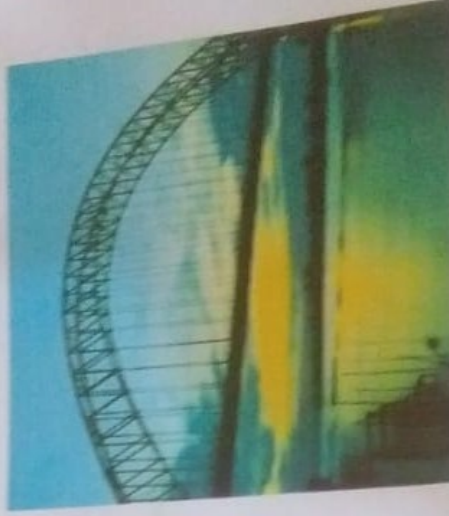
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. BARITO KUALA



RANCANGAN AKHIR RENJA
TAHUN 2020



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KAB. BARITO KUALA



**PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

**RENCANA STRATEGIS
REVIEW**

2017-2022

INSPEKTORAT

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN
2020**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**



PEMERINTAH KABUPATEN

RENCANA KERJA
TAHUN 2020

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA) REVISI
TAHUN 2017-2022**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO KUALA



**RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Barito Kuala

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan
Telp. (0511) 479986



**RANCANGAN
AKHIR RENJA
TAHUN 2020**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BARITO KUALA

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran
Marabahan Telp. (0511) 4799868

OCOPHONE

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
(Perubahan)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
MARABAHAN
2020

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
(Akhir)



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
MARABAHAN
2020

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
(AWAL)

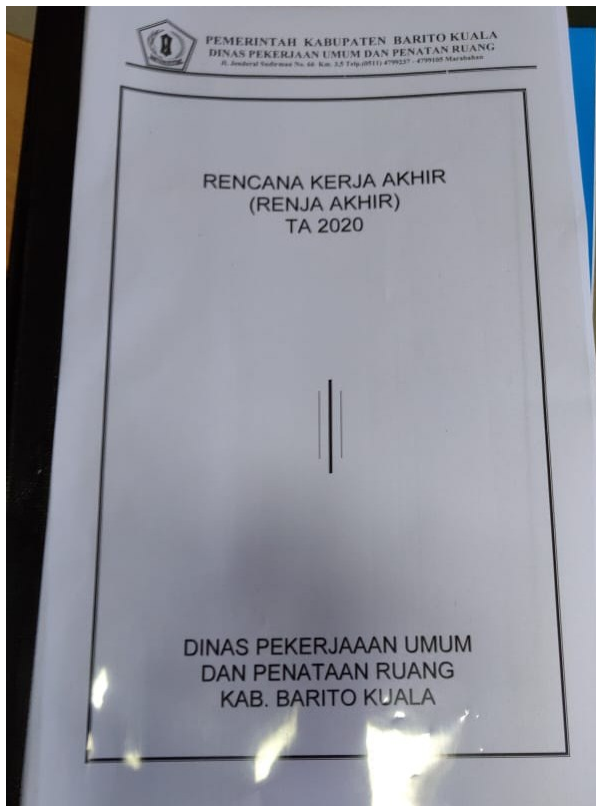
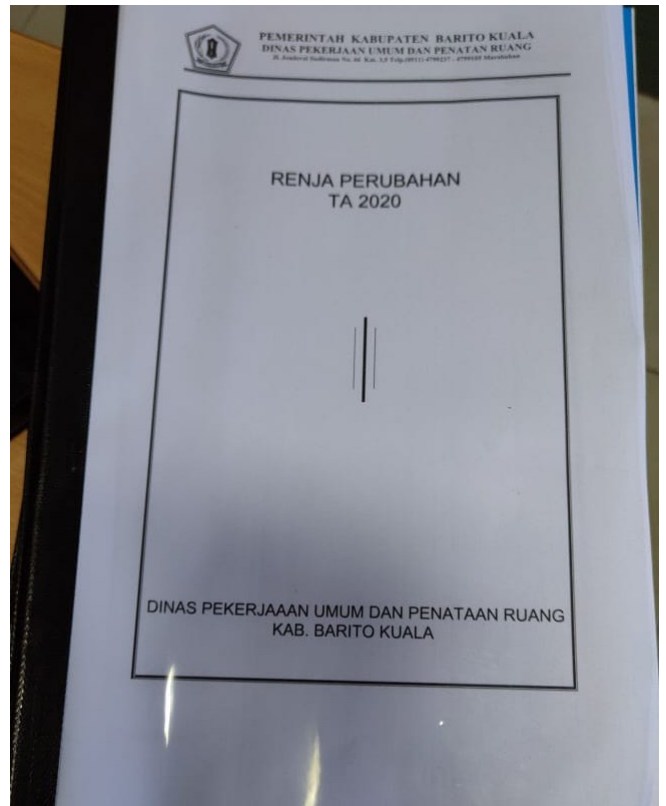
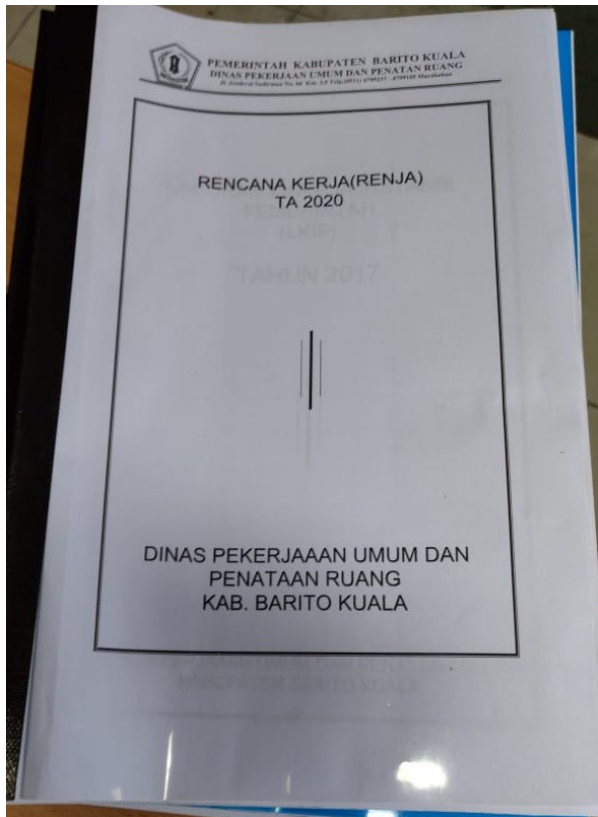


PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
MARABAHAN
2020

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

**RENSTRA
BPKAD 2017 – 20
REVIEW
TAHUN 2020**

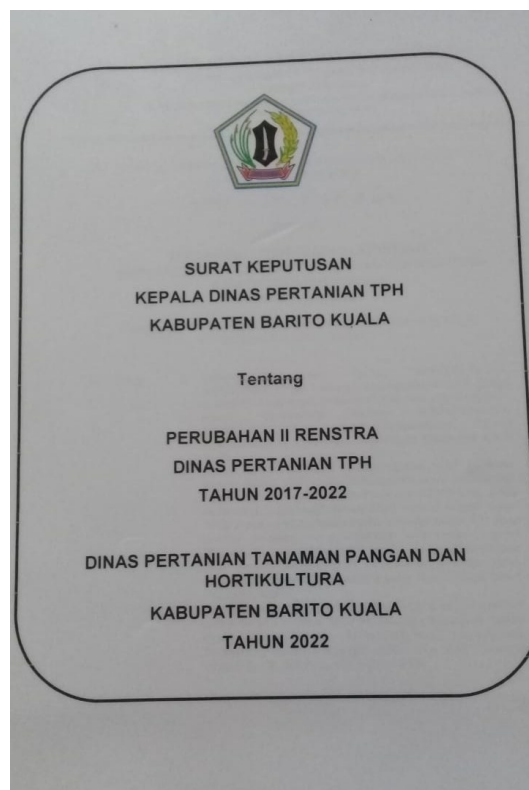
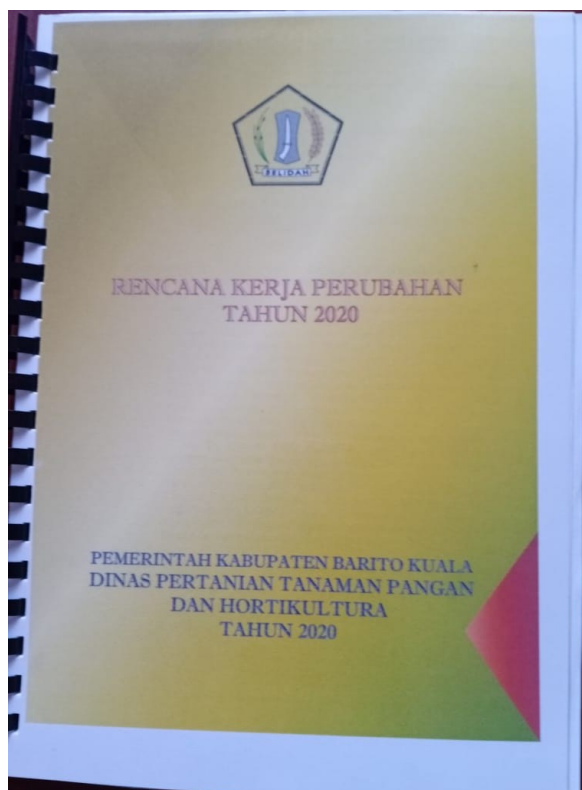
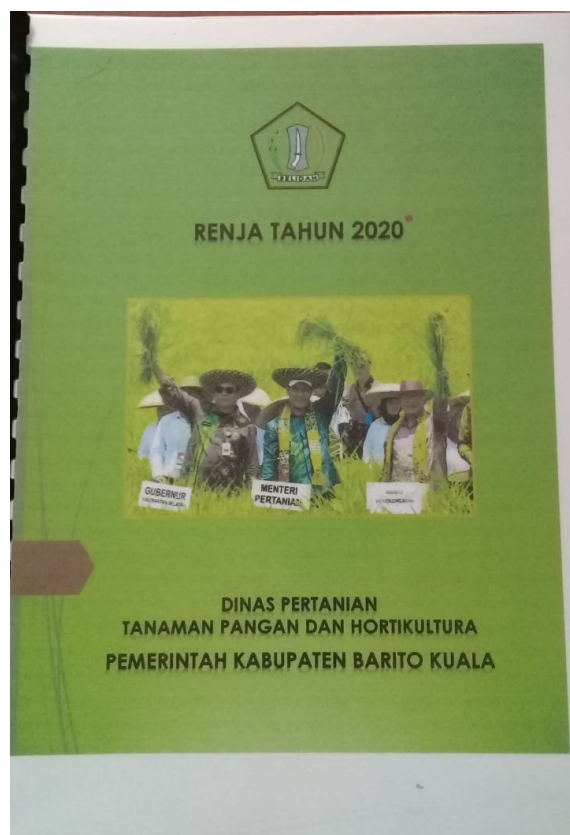


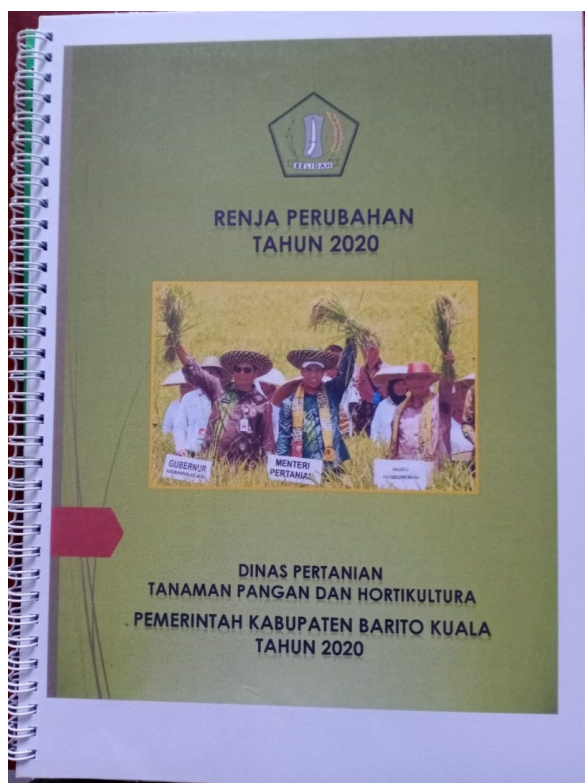
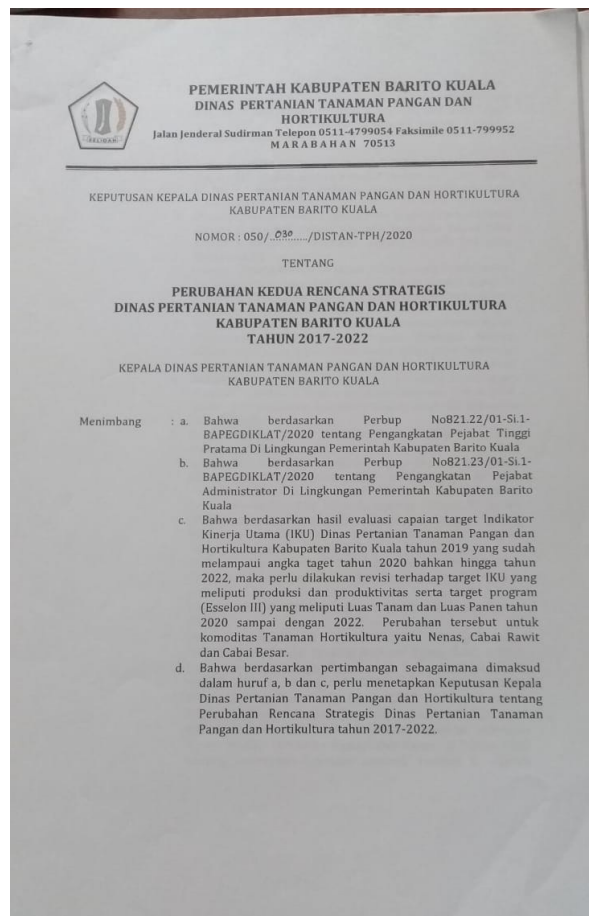
**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

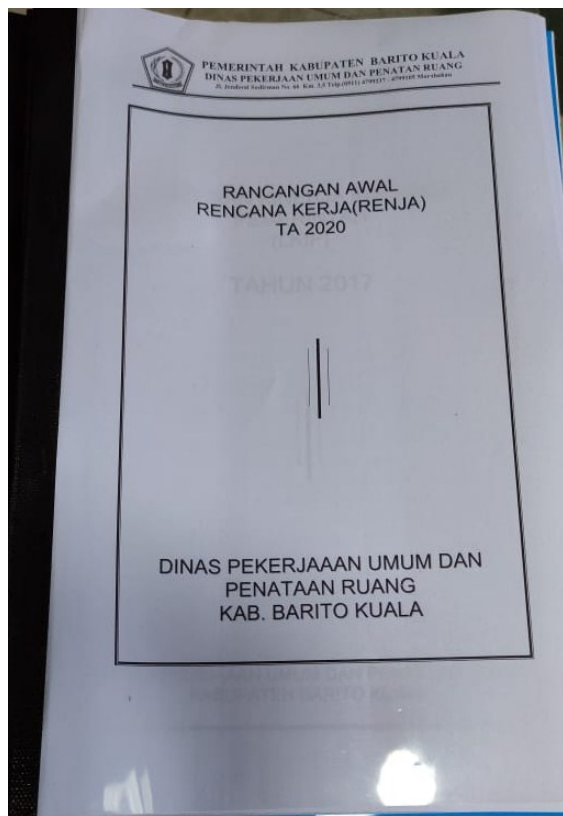
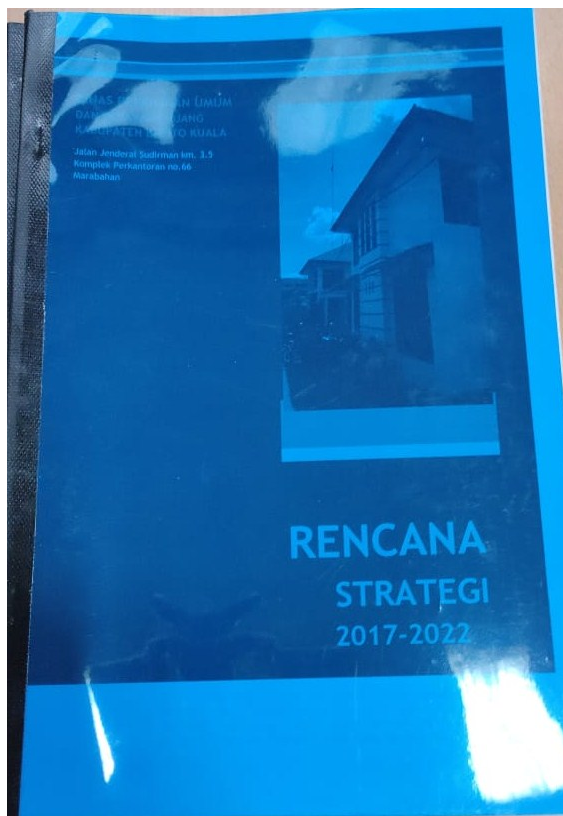
**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
TAHUN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**









RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(*Ranwal Renja*)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Alamat: Jl.Jenderal Sudirman No.05 Marabahan
MARABAHAN 70513



RENCANA KERJA AKHIR
(*RENJA AKHIR*)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Alamat: Jl.Jenderal Sudirman No.05 Marabahan
MARABAHAN 70513



RENCANA KERJA PERUBAHAN
(*RENJA PERUBAHAN*)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Alamat: Jl.Jenderal Sudirman No.05 Marabahan
MARABAHAN 70513

Filters



RENCANA KERJA
(*RENJA*)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Alamat: Jl.Jenderal Sudirman No.05 Marabahan
MARABAHAN 70513

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA
Alamat : Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp. 0511-670166 Fax. 0511-6701255
Marabahan - Kabupaten Barito Kuala
Website : www.diskominfo.baritokualakab.go.id e-Mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

RANWAL RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA
Alamat : Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp. 0511-670166 Fax. 0511-6701255
Marabahan - Kabupaten Barito Kuala
Website : www.diskominfo.baritokualakab.go.id e-Mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA
Alamat : Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp. 0511-670166 Fax. 0511-6701255
Marabahan - Kabupaten Barito Kuala
Website : www.diskominfo.baritokualakab.go.id e-Mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
2017- 2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA
Alamat : Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Telp. 0511-670166 Fax. 0511-6701255
Marabahan - Kabupaten Barito Kuala
Website : www.diskominfo.baritokualakab.go.id e-Mail : diskominfo@baritokualakab.go.id

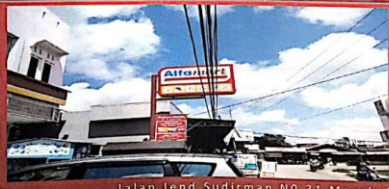


PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022



Jalan Jend. Sudirman NO.31 Marabahan
Telp.0511 4799600 Email : dpmtspbaritokualakab@gmail.com

LAMPIRAN 6

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Periode RKA perangkat Daerah :

$$(\dots)$$

Formulir E.73

Checklist Pengendalian dan Evaluasi dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota:

Periode Renstra Perangkat Daerah:-.....

RPJMD Kabupaten / Kota	RENSTRA – Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
1	2	3	4	5	6	7
Visi dan Misi	Visi dan Misi					
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran					
Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan					
Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan Sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif					

.....,Tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH

.....
KABUPATEN/KOTA

(.....)